

**PERILAKU POLITIK BUNG HATTA
(Sebuah Telaah Etika Politik)**



Oleh :

MochamadParmudi
NIP. 196904252000031001
Lektor Kepala / IV A

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Atas berkat rahmat dan hidayah-NYA, peneliti dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian individual ini dengan judul “Islam dan Demokrasi Di Indonesia: Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam yang dibiayai dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.

Bahwa penyelesaian penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa ada bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian laporan hasil penelitian ini, yaitu:

1. **Rektor IAIN Walisongo Semarang** yang telah memberikan bantuan biaya dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.
2. **Ketua LP2M** (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas, dan rekomendasi/pertimbangan akademis atas terpilihnya proposal penelitian ini.
3. **Reviewer**, dan kolega dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ide, diskusi, dan dialog dalam proses penelitian.
4. **Pihak** yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Mudah-mudahan laporan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan alternatif materi perkuliahan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama atau menjadi *katalisator* sekaligus juga sebagai bahan renungan bagi para politisi dan da'i dalam menempatkan Islam dan Demokrasi di Indonesia secara *proposional*. Kritik dan saran peneliti harapkan.

Semoga bermanfaat. Amin.

Semarang, Septemb er 2014

Peneliti,

Drs. Mochamad Parmudi, M.Si

NiP: 196904252000031001

Abstract

In the framework of scientific development at the Faculty of Social and Political Sciences UIN Walisongo Semarang, since the academic year 2015/2016 has opened the subject of Political Ethics which is aimed to give the reinforcement of the special interests of the students. In the 2015/2016 academic year's academic year, I was given the task of teaching Pancasila Education courses, among others, with the subject of Pancasila as the source of the Indonesian Political Ethics. This research is to strengthen the scientific paradigm of UIN Walisongo, namely science (wahdatul-ulum / unity of sciences), with the humanization strategy of Islamic sciences, the spiritualization of modern sciences, and the revitalization of local wisdom, will also facilitate the development of scholarship knowledge) to improve a humane, and civilized life.

It started with a pretty strong academic anxiety in me. This study intentionally chose the study of Bung Hatta character is titled "Bung Hatta Political Behavior" (A Political Ethics Review). Especially when the present condition is filled with exemplary poverty of an ascetic leader who is able to position himself as a mirror of society. "Emergency political ethics" today makes the presence of "drowsy" Bung Hatta very missed.

This study is a phenomenological study focused on the analysis of description and explanation of Bung Hatta's Political Behavior in the study of political ethics. This research uses qualitative method because the phenomenon studied is socio-political phenomenon. Therefore, a phenomenological approach is used in interpreting "meaning" data. Phenomenological approach to the study of data in the form of appearance. Phenomenology shows the process of "being" and the ability to see visible forms (phenomena) gradually toward the correct object's knowledge (meaning) being targeted. This is actually a descriptive analysis of the essence or ideal structure of the symptoms seen in theory.

The result of this research is that Bung Hatta's political behavior has left the example of political asceticism based on the principle of honesty, simplicity, noble and wise, coupled with actions favoring the people's welfare. Political Ethics want the appearance of political behavior at the level of moral values or social ethics to realize the general meaning in the house of life in order to knit togetherness in the nation and state.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pengembangan keilmuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang maka sejak tahun akademik 2015/2016 telah dibuka mata kuliah Etika Politik yang bertujuan untuk memberikan penguatan atas kompetensi khusus yang dimiliki mahasiswa. Pada semester gasal tahun akademik 2015/2016 saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Pancasila yang antara lain dengan pokok bahasan Pancasila sebagai Etika Politik bangsa Indonesia.

Kemudian daripada itu, penelitian ini dalam rangka memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*wahdatul-ulum/unity of sciences*), dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal, serta memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan (*contribution of knowledge*) untuk meningkatkan kehidupan yang berkemanusiaan, dan berkeadaban.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka latar belakang masalah penelitian ini adalah didasari adanya kegelisahan akademik yang cukup kuat pada diri saya. Bahwa hampir setiap hari rakyat Indonesia menyaksikan berbagai masalah yang muncul di tengah kehidupannya. Dan, masalah tersebut nyaris selalu berhubungan dengan agama (Islam) padahal Indonesia ini terkenal dengan negara yang religius bahkan secara sosiologis mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam. Adapun berbagai masalah yang mengemuka tersebut antara lain mulai dari kasus korupsi, kekerasan berjama'ah atas nama agama, hedonisme, krisis keteladanan (bahkan menurut hemat saya bisa dikatakan 'darurat' etika politik), dan sebagainya.

Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu pemerintah harus mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat,

berserikat bagi setiap warga negara, menegakkan *rule of law*, adanya golongan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak (*living together*). Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan tingkat pluralitas yang cukup tinggi di bidang agama, suku, ras dan golongan. Guna menopang kehidupan beragama, bermasyarakat berbangsa dan bernegara secara damai, sehat, sejahtera dan bahagia maka diperlukanlah teladan politik dari para pemimpin bangsa ini.

Oleh karena itulah, penelitian ini diberi judul “Teladan Politik Bung Hatta” (Sebuah Telaah Etika Politik). Penelitian ini sengaja memilih studi tokoh Bung Hatta. Dalam hal ini, ijin saya mengutip syair lagu dari Iwan Fals. Lirik lagu Iwan Fals ini khusus dipersembahkan untuk Mohammad Hatta, akrab dipanggil dengan Bung Hatta, yang meninggal dunia pada 14 Maret 1980.

“Tuhan, terlalu cepat semua, Kau panggil satu-satunya yang tersisa, Proklamator tercinta. Jujur, lugu, dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi, berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas, jiwa sederhana.”

Kendatipun lagu ini telah beredar secara resmi sejak 1981, ia tetap kontekstual untuk didengarkan pada era sekarang. Terlebih ketika kondisi kekinian dipenuhi dengan kemiskinan teladan tentang sosok pemimpin asketis yang mampu memosisikan diri sebagai cermin masyarakat. Kehancuran moral, hukum, dan etika politik dewasa ini membuat kehadiran “titisan” Bung Hatta sangat dirindukan. Diantara sekian keistimewaan yang dimilikinya dibandingkan *founding fathers* lainnya adalah sosoknya yang hampir tanpa cacat selama 78 tahun menjalani hidup.

Ketika para pemimpin lain jatuh bangun, Bung Hatta menunjukkan integritasnya sebagai sosok tidak (ter)korupsi(kan), meskipun kesempatan baginya terbuka lebar dan dapat diciptakan. Sejarah mencatat bahwa pria berkacamata kelahiran 12 Agustus 1902 ini adalah seorang yang memasuki ranah politik dalam

kesederhanaan, dan tetap sederhana saat meninggal dunia. Jika boleh disederhanakan lagi, dalam diri Bung Hatta terkumpul sifat kejujuran, kesederhanaan, keteguhan hati, serta kekuatan karakter yang sulit dicarikan tandingan. Jadi, tidaklah berlebihan sekiranya saya gelisah dengan adanya berbagai peristiwa tersebut di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan atau pokok masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana teladan politik Bung Hatta dalam kancah perpolitikan di Indonesia ?”

C. Signifikansi Penelitian.

Penelitian ini merupakan sebuah telaah etika politik yang memfokuskan pada analisis deskripsi dan eksplanasi tentang teladan politik Bung Hatta dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan substansi dari etika politik Bung Hatta.
2. Memahami eksistensi, dan signifikansi dari teladan politik Bung Hatta terhadap perpolitikan Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memperkaya bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) sosiologi politik, khususnya mengenai etika politik.
2. Bagi politisi (elite maupun kader partai politik), senator, pejabat pemerintah (birokrat), militer maupun sipil, tokoh/ ilmuwan agama, tokoh masyarakat dan para pemerhati politik, penelitian ini akan bermanfaat secara praktis yaitu berupa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat upayanya menjadi pemimpin politik (*elective-political leader*), termasuk di dalamnya ada *arena living together*. Dan, penelitian ini menjadi penting sebagai rujukan alternatif dalam rangka pengembangan *common platform*; untuk kemanusiaan dan peradaban.

D. Kajian Pustaka.

Sependek pengetahuan saya, ada memoir Mohammad Hatta yang

diterbitkan oleh Tintamas Indonesia pimpinan Ali Audah. Dan, buku Bung Hatta “Sekitar Proklamasi” terbit pada tahun 1969 dengan sambutan cukup besar dari rakyat Indonesia ketika itu sehingga dalam waktu singkat buku itu mencapai cetakan kedua.

Mulyadi J. Amalik, Peneliti dan Sekretaris Empowering Society Institute (ESI), Jakarta, dalam tulisannya: *Demokrasi dan Etika Politik*, menyatakan bahwa Soekarno, Hatta, M. Natsir, Syahrir, Tan Malaka, D.N. Aidit, adalah sebagian kecil dari banyak tokoh bangsa Indonesia yang memikirkan, menuliskan, dan mempraktikkan pandangan-pandangan demokrasi sesuai dengan ideologi masing-masing. Dinamika ideologis di kalangan pejuang demokrasi bangsa Indonesia itu tercermin pada substansi Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi semangat; nasionalisme-religius, nasionalisme-demokrasi, dan nasionalisme-sosialis.¹

Mulyadi memaknai secara luas dan mendalam bahwa etika politik dan demokrasi, sebagai proses kultural atau budaya. Lantaran itu, demokrasi sebagai perilaku atau norma budaya tersebut bisa dibahas dan dipraktikkan di ruang lingkup terkecil kehidupan manusia, seperti dalam keluarga, RT/RW, di ruangan kelas, dalam organisasi adat, atau dalam kelompok sosial-politik, dan seterusnya. Jadi, demokrasi sebagai proses politik akan menjadi bagian kecil saja dari proses kultural atau budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai proses budaya, maka praktik demokrasi layak menghasilkan perilaku-perilaku beradab, bermoral, atau manusiawi, baik diperlihatkan oleh individu-individu maupun kelompok. Negarawan ialah seorang atau kelompok elit politik yang menjadikan demokrasi sebagai proses budaya, meski diwarnai konflik dan perbedaan yang tajam. Itu tercermin dari para Bapak Bangsa kita, seperti Soekarno, Hatta, M. Natsir, dan sebagainya. Pada konteks inilah etika politik sangat berperan mengontrol sikap, pilihan, dan tindakan yang bersifat individual maupun kelompok.

¹) <http://www.slideshare.net/wandadramadhan/4-demokrasi-dan-etika-politik>

Tulisan, Junarto Imam Prakoso, “Memahami Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Bung Hatta (Wakil Presiden RI 1945-1956, Perdana Menteri RIS 1948-1950)” dalam *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol. 5 No. 1/2005, Jakarta: The Habibie Center. Artikel ini menggambarkan praktik-praktik politik Bung Hatta dalam menjalankan pemerintahannya.

Penelitian ini mencoba meramu kepustakaan yang ada, mengkaji lebih lanjut, dan menautkannya dengan penelitian yang lebih komprehensif sesuai dengan judulnya *Teladan Politik Bung Hatta: Sebuah Telaah Etika Politik*.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menekankan pemahaman pada maksud etika sebagaimana yang dikemukakan oleh Dagobert D. Runes dalam karyanya *Dictionary of Philosophy*, bahwa konsep etika itu identik dengan *moral philosophy* yaitu berupa telaah ataupun disiplin yang memusatkan perhatiannya dalam soal penilaian tentang persetujuan dan ketidaksetujuan, kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan.²

Dalam *The Encyclopedia of Philosophy*, Paul Edwards (ed.), menyebutkan bahwa pemahaman tentang konsep etika itu sendiri bisa mengandung tiga maksud yang berbeda. *Pertama*, etika sebagai cara atau pandangan hidup (way of life) seperti etika keagamaan. *Kedua*, etika sebagai kumpulan aturan tentang tingkah laku (moral code) seperti etika perilaku politik, etika profesi, dan sebagainya. *Ketiga*, etika sebagai upaya analisis terhadap way of life dan moral code. Maksud etika yang terakhir ini adalah sebagai cabang filsafat yaitu metaetika.³ Adapun penelitian ini lebih menekankan kepada pemahaman konsep etika yang kedua, khususnya yang berkaitan dengan teladan politik Bung Hatta: sebuah telaah etika politik.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan data

² Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Azhar dalam bukunya yang berjudul *Etika Politik Islam: Studi Kritis Pemikiran Mohammed Arkoun* (Yogyakarta: CV New Transmedia Communication Publisher, 2014), hlm. 21-22.

³ *Ibid.*

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena gejala (*fenomena*) yang diteliti merupakan gejala perilaku politik. Metode penumpukan data dalam penelitian ini menggunakan sumber utama yaitu studi pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan meneliti sejumlah buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, dan sebagainya. Di samping itu, penelitian pustaka juga dilakukan melalui eksplorasi elektronik (*internet*) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Berfikir Induktif

Penelitian ini bekerja dengan cara berfikir *induktif*, yaitu memecahkan masalah dengan menempuh cara berfikir *syntetik* yang pembuktian kebenarannya bersifat *a posteriori*. Cara ini bertolak dari berbagai pengetahuan dan fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret, kemudian dari rangkaian fakta khusus itu ditarik *generalisasi* (pengetahuan yang umum).⁴ Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana apa adanya.⁵

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang dianalisis, agar jelas keadaannya.⁶ Oleh karena itu pada tahap ini fungsinya tidak lebih daripada penggambaran yang bersifat penemuan fakta-fakta sebagaimana adanya (*fact finding*), dan mengemukakan hubungan satu (variabel) dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti itu.

Pada tahap berikutnya analisis akan diberi bobot yang lebih tinggi yaitu dengan memberikan penafsiran yang *adequate* terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada tingkat

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 42-46.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63-64

⁶ *Ibid.*, lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 18-19.

pengumpulan dan menyusun data saja, tetapi meliputi juga analisa interpretasi mengenai makna data yang diperoleh.⁷ Oleh karena itu, analisis ini dipandang sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan hubungan antargejala, dan sebagainya.⁸ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif merupakan langkah-langkah metodologis dalam melakukan “representasi” objektif tentang gejala-gejala yang nampak di dalam masalah yang diteliti dengan bersumber pada literature (buku, makalah, jurnal, artikel, eksplorasi internet, dan atau yang sejenis) yang berhubungan dengan teladan politik Bung Hatta.

Terkait dengan objek kajian sebagaimana tersebut di atas maka pendekatan fenomenologis digunakan pula dalam menafsirkan “makna” data. Pendekatan fenomenologis dimaksudkan untuk meneliti data menurut bentuk-bentuk penampakkannya. Fenomenologis menunjukkan proses “menjadi” dan kemampuan mengetahui bentuk-bentuk (gejala yang nampak) secara bertahap untuk menuju pengetahuan (makna) yang benar dari objek yang diamati. Jadi, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang teladan politik Bung Hatta. Pendekatan ini sebenarnya merupakan analisis deskriptif tentang esensi atau struktur ideal dari gejala-gejala yang nampak dalam perilaku politik Bung Hatta. Reza A.A Wattimena menjelaskan tentang pendekatan fenomenologis yang cukup representatif dan komprehensif untuk pembahasan politik. Bahwa fenomenologi (*phenomenology*) adalah sebuah cara mendekati realitas yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Edmund Husserl. Cita-cita dasarnya adalah menjadikan fenomenologi sebagai ilmu tentang kesadaran (*science of consciousness*). Dalam arti ini fenomenologi adalah “sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.” Fenomenologi sendiri secara harafiah berarti refleksi atau studi tentang suatu fenomena (*phenomena*). Fenomena adalah segala sesuatu yang

⁷ Bandingkan Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 1999), hlm. 6.

⁸ Bandingkan dengan Anton Bakker, Achmad Charis Zuber, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 54

tampak bagi manusia. Fenomenologi terkait dengan pengalaman subyektif (*subjective experience*) manusia atas sesuatu.

Dengan demikian fenomenologi adalah sebuah cara untuk memahami kesadaran yang dialami oleh seseorang atas dunianya melalui sudut pandangnya sendiri. Jelas saja pendekatan ini amat berbeda dengan pendekatan ilmu-ilmu biologis ataupun positivisme.⁹ Ilmu-ilmu biologis ingin memahami cara kerja kesadaran melalui unsur biologisnya, yakni otak. Dalam arti ini mereka menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni sudut pandang pengamat. Kesadaran bukanlah fenomena mental, melainkan semata fenomena biologis. Sebaliknya fenomenologi menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni dengan “melihat pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.”¹⁰

Namun fenomenologi juga tidak mau terjatuh pada deskripsi perasaan semata. Yang ingin dicapai fenomenologi adalah pemahaman akan pengalaman konseptual (*conceptual experience*) yang melampaui pengalaman inderawi itu sendiri. “Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai pada makna yang lebih bersifat konseptual, yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri.” Dalam hal ini yang ingin dipahami adalah kesadaran, bukan dalam arti kesadaran biologis maupun perilaku semata, tetapi kesadaran sebagaimana dihayati oleh orang yang mengalaminya. Kesadaran orang akan pengalamannya disebut sebagai pengalaman konseptual. Bentuknya bisa beragam mulai dari imajinasi, pikiran, sampai hasrat tertentu, ketika orang mengalami sesuatu.¹¹

Salah satu konsep kunci di dalam fenomenologi adalah makna (*meaning*). Setiap pengalaman manusia selalu memiliki makna. Dikatakan sebaliknya manusia selalu memaknai pengalamannya akan dunia. Ini yang membuat kesadarannya akan suatu pengalaman unik. Orang bisa melakukan hal yang sama, namun memaknainya secara berbeda. Orang bisa mendengarkan pembicaraan yang sama, namun

⁹ Tentang batas-batas positivisme bisa dilihat di Budi Hardiman, F., *Melampaui...*, 2003.

¹⁰ Reza A.A. Wattimena, “Berbagai...”, hal. 189.

¹¹ *Ibid.*

memaknainya dengan cara berbeda. Lebih jauh dari itu, “pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, karena orang memaknainya.” Di dalam proses memaknai sesuatu, orang bersentuhan dengan dunia sebagai sesuatu yang teratur dan dapat dipahami (*order and intelligible*). Apa yang disebut sebagai “dunia” adalah suatu kombinasi antara realitas yang dialami dengan proses orang memaknai realitas itu.¹²

Fenomenologi berada pada status yang berbeda dari ilmu alam maupun ilmu sosial. Di dalam tulisan-tulisannya, Husserl menegaskan, bahwa fenomenologi tidak mau mempersempit manusia hanya ke dalam perilakunya (*human behavior*), seperti yang terdapat di dalam positivisme.¹³ Fenomenologi juga tidak mau jatuh dalam melakukan generalisasi semata berdasarkan pengamatan atas perilaku manusia. “Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari sudut pandang orang yang mengalaminya.”¹⁴

Husserl memperkenalkan model baru di dalam memahami manusia. Ketika sedang melakukan penelitian tentang manusia, seorang peneliti bukanlah subyek yang terpisah dari yang ditelitinya. Dengan kata lain peneliti dan yang diteliti melebur menjadi satu dalam interaksi yang khas. Dalam proses ini peneliti tidak boleh terjebak pada pengalaman partikular, tetapi harus mampu menembus masuk ke dalam pengalaman kesadaran (*experience of consciousness*) orang terkait. Seorang peneliti harus mampu memahami makna dari manusia tersebut, dan mencoba melihat dunia dari kaca mata kesadarannya.¹⁵

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi kesadaran (*essence of consciousness*), sebagaimana dilihat dari sudut pandang

¹² *Ibid*, hal. 190.

¹³ Tentang batas-batas positivisme bisa dilihat di Budi Hardiman, F., *Melampaui...*, 2003.

¹⁴ Wattimena, “Berbagai...” hal. 191.

¹⁵ Di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial, ini disebut sebagai hermeneutika ganda, di mana terjadi interaksi saling mempengaruhi antara si peneliti dengan subyek yang sedang ditelitinya. Pemikir yang pertama kali merumuskan konsep ini secara sistematis adalah Anthony Giddens. Sebagai perbandingan bisa ditelusuri link:

http://en.wikipedia.org/wiki/Double_hermeneutic

orang yang mengalaminya. Namun apakah sesungguhnya arti kesadaran (*consciousness*)? Di dalam tulisan-tulisan Husserl, setidaknya ada dua arti kesadaran. Pertama, kesadaran adalah dasar dari pengalaman (*foundation of experience*). Dikatakan sebaliknya setiap pengalaman manusia adalah ekspresi dari kesadaran itu sendiri (*expression of consciousness*). Segala bentuk pengalaman disadari oleh orang secara subyektif. Kedua, kesadaran manusia selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Inilah satu konsep yang disebut Husserl sebagai intensionalitas kesadaran (*intentionality of consciousness*). Intensionalitas merupakan karakter dasar pikiran manusia. Pikiran selalu merupakan pikiran akan sesuatu, dan tidak pernah merupakan pikiran pada dirinya sendiri.¹⁶

Pada kesan pertama fenomenologi terkesan hanya berfokus pada level individual. Artinya fenomenologi hanya cocok untuk memahami kesadaran perorangan, dan bukan kelompok. Namun di dalam tulisannya, John Drummond menunjukkan, bahwa fenomenologi juga bisa digunakan untuk memahami “yang politis” (*the political*) itu sendiri. Bahkan ia menggunakan pendekatan ini untuk memahami sejarah terjadinya komunitas politis (*political community*), mulai dari komunitas kultural tradisional (*cultural community*), sampai menjadi komunitas politis legal modern (*modern legal political community*), seperti yang dikenal sekarang ini.¹⁷ Dengan demikian sebagai sebuah pendekatan, fenomenologi cukup lentur digunakan, bahkan untuk memahami politik itu sendiri.

Politik secara harfiah adalah “aktivitas yang membuat manusia mencipta, melestarikan, dan menerapkan aturan-aturan di dalam hidupnya.”¹⁸ Maka politik jelas merupakan sebuah aktivitas sosial (*social activities*). Di dalam kata politik, secara

¹⁶ Wattimena, “Berbagai....” hal. 192.

¹⁷ Lihat salah satu buku yang menjadi acuan utama saya Drummond, John. J., “Political Community”, dalam *Phenomenology of the Political*, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000.

¹⁸ Untuk bagian tentang politik, saya mengacu pada Wattimena yang mengkses link: <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/what.asp> pada 19 Maret 2011. Pk. 07.30. Palgrave adalah penerbit akademik. Situs ini mengacu pada buku Andrew Heywood yang diterbitkan oleh penerbit terkait.

fenomenologis, dapatlah dikatakan, manusia sekaligus ada dan mencipta tata sosial yang melingkupinya. Di dalam tata sosial tersebut, selalu ada konflik dan keberagaman (*diversity*). Juga di dalam tata sosial tersebut, selalu ada dorongan dari dalam diri setiap orang untuk bekerja sama. Maka dapatlah disimpulkan menurut Heywood, politik sebagai sebuah proses bekerja sama untuk melampaui konflik, akibat keberagaman pola hidup yang ada di dalamnya. Tentu saja¹⁹ seperti dicatat oleh Heywood, tidak semua konflik yang ada bisa diselesaikan.

Secara fenomenologis dapat pula dikatakan, bahwa politik bukan semata kenyataan sosial (*social reality*) itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu seni untuk memimpin, atau memerintah.²⁰ Di dalam kata politik terkandung makna manajemen urusan publik (*public affairs management*). Dan, di dalam kata manajemen urusan publik sudah selalu terkandung makna tata kelola konflik, akibat keberagaman kepentingan ataupun pandangan dunia yang ada. Dalam arti ini politik adalah kompromi di level sosial akan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri (*social compromise*). Inilah makna fenomenologis dari politik, sebagaimana di tafsirkan dari pemikiran Heywood. Dalam arti ini politik tidaklah dilihat segi normatifnya, seperti dalam etika politik, melainkan segi deskriptifnya, yakni sebagai tata kelola sosial yang melibatkan kompromi, guna menjaga keberadaan tata sosial itu sendiri (*the existence of social order*).

Namun ada pengertian lain tentang politik. Politik tidak hanya soal ruang publik (*public sphere*),²¹ di mana orang-orang berkumpul, tetapi juga merupakan urusan privat (*private matters*). Politik beroperasi di ruang privat, ketika politik dipahami sebagai relasi-relasi kekuasaan yang bergerak di masyarakat, demikian tulis Heywood.²² Di dalam sejarah filsafat politik, setidaknya ada dua macam bentuk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tentang ontologi dari realitas sosial, bisa membaca secara lengkap karya, Reza A.A. Wattimena, *Filsafat dan Sains*, Grasindo, Jakarta, 2008.

²¹ Lihat berbagai uraian yang amat mendalam soal problematik ruang publik dalam Hardiman, F. Budi., *Ruang Publik*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

²² Heywood, dalam Palgrave.

analisis tentang makna politik. Yang pertama adalah teori normatif tentang politik (*normative theory*). Di dalamnya para filsuf merumuskan tentang bagaimana seharusnya sebuah politik itu beroperasi di masyarakat.²³ Sementara yang kedua adalah pendekatan empiris di dalam memahami politik (*empirical approach*). Di dalamnya para filsuf mencoba memahami dinamika institusi dan struktur di masyarakat.²⁴ Teori strukturasi dan teori perilaku (*behavioral theory*), menurut Heywood, dominan di dalam pendekatan ini.²⁵

Pendek kata, fenomenologi dapat membantu kita untuk dapat memahami politik pada dirinya sendiri, yakni politik sebagaimana ia menampakkan diri kepada kita. Di dalam positivisme klasik, tujuan itu dicapai dengan pertama-tama membedakan antara fakta dan nilai (*facts and values*) di dalam politik. Namun pandangan ini kemudian ditantang. Bagaimana mungkin orang bisa mencerap fakta tanpa nilai yang ia pegang, baik sadar ataupun tidak? Bagaimana mungkin observasi dilepaskan dari kerangka berpikir seseorang yang mengandung begitu banyak nilai, baik implisit ataupun eksplisit?²⁶ Di dalam hidupnya setiap orang, menurut Heywood, selalu menggendong paradigma dalam bentuk teori dan nilai yang ia yakini. Inilah yang membuat pada akhirnya pendekatan positivisme tradisional tidak lagi memadai, guna memahami realitas sosial.²⁷

Menurut Heywood salah satu konsep yang paling mendasar di dalam politik adalah konsep otoritas (*political authority*). Dengan kata lain secara fenomenologis, setiap bentuk tata politik selalu mengandaikan adanya otoritas di dalamnya, baik implisit maupun eksplisit. Dalam arti ini otoritas, menurut Heywood, adalah

²³Pada era sekarang ini, salah satu filsuf politik normatif yang cukup ternama adalah Juergen Habermas. Untuk penjelasan lebih jauh mengenai filsafat politik Habermas, anda dapat melihat pada Budi Hardiman, F., *Demokrasi Deliberatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

²⁴Salah seorang filsuf yang pemikirannya cukup banyak perhatian dalam upayanya memahami dinamika institusi modern adalah Pierre Bourdieu. Untuk keterangan lebih jelas tentang pendapat Bourdieu, anda dapat melihat, Reza A.A. Wattimena, *Filsafat dan Sains...*2008.

²⁵Heywood, dalam Palgrave

²⁶Uraian cukup panjang tentang ini bisa dilihat di buku saya Wattimena, Reza A.A., *Filsafat dan Sains...*, 2008.

²⁷Heywood, dalam Palgrave.

kekuasaan yang sah (*legitimate power*). Sementara baginya kekuasaan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain”.²⁸ Kekuasaan hanya menjadi sah, ketika berada dalam bentuk otoritas.²⁹ Otoritas adalah sebarang pengakuan, bahwa perintah dari satu pihak itu layak, dan bahkan wajib, untuk dipatuhi secara tanpa paksaan ataupun manipulasi dalam bentuk apapun. “Dalam arti ini”, demikian tulis Heywood, “otoritas adalah kekuasaan yang diselubungkan dengan legitimasi atau keabsahan.”³⁰

Selain soal otoritas politik juga selalu sudah terkait dengan tata kelola (*governance*). Dan tata kelola tersebut dilakukan oleh suatu institusi yang bernama negara, atau pemerintah (*government*). Namun menurut Heywood walaupun pemerintah biasanya menjadi pihak yang mengelola, namun tata kelola itu sendiri tetap bisa berlangsung, walaupun suatu saat nanti, pemerintah atau negara tidak ada.³¹ Jadi tata kelola bisa tetap terjadi, walaupun negara absen. Ini terjadi karena prinsip utama tata kelola bukanlah kehadiran negara, melainkan jaringan (*networks*) dan hirarki (*hierarchies*). Kedua hal itu selalu ada, walaupun pemerintah atau negara tidak ada. Jaringan bisa terbentuk melalui lahirnya organisasi-organisasi independen (*independent organizations*) di dalam masyarakat yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam ideologi neoliberalisme, yang amat mengedepankan pasar bebas (*free trade*), peran pemerintah, atau negara, menjadi amat kecil.³²

Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa pemerintah adalah pihak yang memerintah. Dan dalam arti ini, memerintah berarti mengatur pihak lain, juga memerintah tidak selalu hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga bisa berupa

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dengan nada yang agak negatif dan kritis, Antonio Gramsci, seorang filsuf Marxis abad ke-20, merumuskan konsep hegemoni untuk menjelaskan fenomena ini. Hegemoni adalah konsep yang menjelaskan suatu gejala, di mana Untuk lebih jelasnya silahkan lihat uraian Femia, Joseph, *Gramsci's Political Thought*, Clarendon Press, Oxford, 1981.

³⁰ Heywood, dalam Palgrave

³¹ *Ibid.*

³² Konsep fundamentalisme pasar di mana pasar bebas dianggap mampu mengatur politik dan ekonomi masyarakat dapat ditemukan di dalam ideologi neoliberalisme. Untuk keterangan lebih dalam, anda bisa melihat di Steger, Manfred B. (et.al), *Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

mekanisme tertentu, seperti mekanisme hukum, di mana tatanan dipertahankan. Menurut Heywood mekanisme ini bisa membantu suatu masyarakat membuat keputusan seadil mungkin, tanpa tergantung kebijaksanaan pimpinan masyarakat.³³ Maka bentuk tata kelola yang dilakukan oleh suatu otoritas tertentu dapatlah ditemukan di berbagai tempat, seperti di keluarga, sekolah, perusahaan, dan bahkan pertemanan sehari-hari. Kata politik, tata kelola, otoritas, dan pengaturan, secara fenomenologis, terkait satu sama lain, tanpa bisa dipisahkan begitu saja.

Sebagaimana dinyatakan oleh Heywood, ada satu konsep lagi yang selalu inheren di dalam politik, yakni kekuasaan (*power*). Secara fenomenologis sejauh saya menafsirkan tulisan-tulisan Heywood, kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka kekuasaan selalu bersifat aktif, yakni kemampuan dari dalam diri seseorang, atau institusi, untuk melakukan sesuatu di dunia.³⁴ Pada level individual kekuasaan, secara fenomenologis, adalah kemampuan untuk mencipta sesuatu, atau melakukan sesuatu. Pada level sosial kekuasaan, secara fenomenologis, adalah relasi.³⁵ Dalam arti ini relasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir maupun perilaku orang lain. Bahkan bagi Heywood kekuasaan pada level politik, secara fenomenologis, selalu dapat dimengerti sebagai “kekuasaan atas orang lain” (*power over other people*).³⁶

Di dalam pemikiran John Drummond, kata fenomenologi dan kata politik terkait erat satu sama lain. Ia mencoba untuk memahami lahirnya komunitas politis dengan pendekatan fenomenologis. Jadi ia tidak hanya ingin memahami esensi politik, tetapi juga memahami mekanisme kelahiran tata politik. Dalam konteks ini layaklah kita mengajukan pertanyaan, apa yang melahirkan sebuah komunitas politis? Bagaimana mekanisme terbentuknya komunitas politik, jika dipahami secara

³³ Heywood, dalam Palgrave.

³⁴ *Ibid.* <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp> diakses pada 19 Maret 2011. Pk. 07.40.

³⁵ Untuk pendalaman teori mengenai kekuasaan, anda dapat melihat di Sasongko, James. W., “Manusi, Karya, dan Kuasa”, dalam *Membongkar Rahasia Manusia*, Wattimena, Reza A.A., (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 197.

³⁶ *Ibid.* <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp>

fenomenologis? Inilah pertanyaan yang menjadi dasar dari filsafat politik. Lebih dari 80 tahun lalu, Edmund Husserl merumuskan problematik itu dengan sangat baik. Baginya ada dua bentuk negara, yakni negara alamiah (*natural state*) dan negara artifisial (*artificial state*). Dalam arti ini negara adalah komunitas politis. Negara artifisial terbentuk dari tindakan politik yang disengaja (*voluntary action*), yakni pembentukan sebuah persekutuan (*union*). Sementara negara alamiah diwariskan dari generasi sebelumnya, dan biasanya dipimpin oleh satu pemimpin tunggal, seperti seorang kaisar, raja, atau bahkan tiran.³⁷

Menurut Drummond kedua argumen tersebut tidaklah bisa dipisahkan. Negara adalah suatu paradoks.³⁸ Dalam arti negara tercipta oleh dua hal yang berbeda, yakni sekaligus alamiah sekaligus berdasarkan kesepakatan.³⁹ Di satu sisi negara dan masyarakat adalah soal keterkaitan seorang dengan sejarah nenek moyangnya. Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa kita selalu sudah ada di dalam kaitan dengan nenek moyang kita. Inilah yang disebutnya sebagai komunitas etnis-familial.⁴⁰ Juga dapatlah dikatakan bahwa ketika lahir, kita sudah selalu ada di dalam konteks kekuasaan tertentu, misalnya kekuasaan seorang ayah yang memiliki otoritas atas keluarganya.⁴¹ Namun setiap orang tidak hanya selalu lahir dan ada di dalam konteks keluarganya, tetapi juga dalam konteks politis masyarakatnya. Ia bisa saja

³⁷ Edmund Husserl sebagaimana dikutip oleh Drummond, John. J., "Political Community", dalam *Phenomenology of the Political*, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000. Untuk bagian ini saya mengikuti uraian Drummond sambil mengacu pada teks-teks asli Husserl.

³⁸ Paradoks adalah dua hal yang bertentangan, namun membentuk kesatuan makna yang mengandung kebenaran. Misalnya manusia itu sekaligus baik dan jahat. Atau negara itu sekaligus alamiah dan diciptakan. Lihat pemahaman tentang paradoks manusia dalam Snijders, Adelbert, *Manusia: Sintesis Paradoksal*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

³⁹ Konsep komunitas politis sebagai produk dari kesepakatan amat kental di dalam filsafat modern, terutama para teoritikus kontrak sosial, seperti J.J Rousseau dan Thomas Hobbes. Lihat buku berikut *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, David Boucher and Paul Kelly (eds), Routledge, London, 1994, hal. 35-50, dan 117-134.

⁴⁰ Drummond, "Political Community", hal. 29.

⁴¹ Di dalam bukunya yang berjudul *Being and Time*, Heidegger menegaskan, bahwa manusia terlempar ke dalam dunia, selalu ada di dalam dunia, dan selalu ada bersama yang lain. Argumen ini sebenarnya ingin menegaskan, bahwa manusia sudah selalu ada di dalam komunitas. Penjelasan lebih jauh bisa dilihat di Heidegger, Martin, *Being and Time*, Joan Stambaugh (trans), New York Press, New York, 1996.

lahir dan hidup di dalam kepemimpinan seorang kaisar, presiden, ataupun seorang jenderal perang.⁴² Disinilah bedanya. Bagi Drummond keluarga dan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Keluarga adalah sesuatu yang terbentuk secara alamiah. Pola yang ada di dalamnya adalah pola cinta yang sifatnya spontan. Sementara masyarakat dengan tata politiknya adalah sesuatu yang diciptakan. Pola hubungan di dalamnya lebih berpijak pada nilai-nilai sosial, seperti keadilan, dan bukan pada nilai-nilai personal, seperti cinta spontan. Namun tepatkah pandangan tersebut? Benarkah komunitas politis –termasuk di dalamnya masyarakat dan negara- adalah sebagian bersifat alamiah, dan sebagian lainnya tidak?

Drummond ingin menegaskan bahwa negara maupun masyarakat adalah suatu komunitas politis. Dan, komunitas politis --pada hakekatnya-- tidak pernah melulu hadir sebagai bentukan alamiah semata, ataupun hasil kesepakatan semata, melainkan kombinasi antara keduanya. Maka menurutnya analisis tentang negara dan masyarakat haruslah selalu terkait dengan analisis mengenai hakekat dari komunitas.⁴³ Untuk menjelaskan ini ada dua hal yang kiranya mesti ditegaskan. *Pertama*, manusia --sebagai mahluk pembentuk polis-- adalah mahluk yang otonom. Ia mampu dengan sadar mengaktualisasikan dirinya untuk menciptakan pribadi yang otentik.⁴⁴ *Kedua*, dengan pemahaman semacam itu, maka penciptaan komunitas yang otentik juga dimungkinkan.⁴⁵ Komunitas otentik adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang otentik, dan bisa terus mempertanyakan serta memperbarui dirinya di dalam menanggapi perubahan. Jadi, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang teladan politik Bung Hatta.

⁴²Di dalam sejarah cukup lama komunitas politis itu adalah sekumpulan orang yang hidup di dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka tidak dipimpin oleh seorang raja ataupun kaisar, melainkan oleh seorang panglima perang yang dianggap bijaksana.

⁴³Diskusi cukup dalam mengenai hal ini ada di dalam Wattimena, Reza A.A, *Filsafat dan Sains: Sebuah Pengantar*, Jakarta, Grasindo, 2008, hal. 262-276.

⁴⁴ Drummond, "Political ...", hal. 30.

⁴⁵ Komunitas otentik terdiri dari pribadi-pribadi yang otentik. Untuk keterangan lebih jauh dapat dilihat di Golomb, Jacob, *In Search of Authenticity*, Routledge, London, 1995.

BAB II

Biografi Bung Hatta



- Lahir di Bukittinggi 12 Agustus 1902
- Meninggal di Jakarta 14 Maret 1980
- Proklamator
- Wakil Presiden Pertama RI
- Bapak Koperasi Indonesia

A. Biografi Bung Hatta

Dalam hal ini, peneliti sengaja menyadur biografi Mohammad Hatta dari memoirnya.¹⁾ Sosok Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi itu sangat bersahaja, jujur, lugu, dan sederhana hingga akhir hayatnya. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya. Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi karakteristik Bung Hatta.

1. Studi di Negeri Belanda

Pada tahun 1921 Hatta tiba di negeri Belanda untuk belajar pada HandelsHoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging.

¹⁾ Lihat juga: <http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-mohammad-hatta.html>

Pada tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi *Indonesische Vereniging* (Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI). Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, *Hindia Poetra*, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi *Indonesia Merdeka*. Hatta lulus dalam ujian *handels economie* (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato inaugurasi yang berjudul "*Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen*"--Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif. Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI.

Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa. PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres internasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpindelegasi. Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama "Indonesia", Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, "Indonesia" secara resmi diakui oleh kongres. Nama "Indonesia" untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional. Hatta dan

pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu.

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi "Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan" di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta *L'Indonesie et son Probleme de l'Independence* (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan). Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadingrat, Hatta dipenjarakan selama lima setengah bulan.

Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama "Indonesia Vrij", dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul *Indonesia Merdeka*. Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah *Daulat Ra'jat* dan kadang-kadang *De Socialist*.

Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.

2. Kembali ke Tanah Air

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk *Daulat Ra'jat* dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya. Reaksi Hatta yang keras

terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra'jat, yang berjudul "Soekarno Ditahan" (10 Agustus 1933), "Tragedi Soekarno" (30 Nopember 1933), dan "Sikap Pemimpin"(10Desember1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.

3. Masa Pembuangan

Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal.

Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti.

Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, "Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan" dan "Alam Pikiran Yunani."(empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-lain.

4. Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada, menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggal 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, "Indonesia

terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."

5. Proklamasi Kemerdekaan

Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Soebardjo, Soekarno, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai, mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti. Soekarno mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta.

Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.



Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda. Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli 1947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana.

Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang memimpin Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

6.PeriodeTahun1950-1956

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai

karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul "Lampau dan Datang". Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul "Menuju Negara Hukum".

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis "Demokrasi Kita" dalam majalah *Pandji Masyarakat*. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu. Dalam masa

pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus. Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi "Bintang Republik Indonesia Kelas I" pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara. Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

Berikut Biodata dari Mohammad Hatta;

Nama Lengkap : Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta), Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1902 Wafat : Jakarta, 14 Maret 1980, Istri : (Alm.) Rahmi Rachim. Anak :1. Meutia Farid 2. Gemala 3.Halida Nuriah. **Gelar Pahlawan** : Pahlawan Proklamator RI tahun 1986

Pendidikan :

- Europese Lagere School (ELS) di Bukittinggi (1916)
- Meer Uirgebred Lagere School (MULO) di Padang (1919)
- Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang), Jakarta (1921)
- Gelar Drs dari Nederland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda (1932)

Karir :

- Bendahara Jong Sumatranen Bond, Padang (1916-1919)
- Bendahara Jong Sumatranen Bond, Jakarta (1920-1921)
- Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925-1930)

- Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, Berlin (1927-1931)
- Ketua Panitia (PNI Baru) Pendidikan Nasional Indonesia (1934-1935)
- Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Jepang (April 1942)
- Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Mei 1945)
- Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (7 Agustus 1945)
- Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945)
- Wakil Presiden Republik Indonesia pertama (18 Agustus 1945)
- Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (Januari 1948 - Desember 1949)
- Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana (1949)
- Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet Republik Indonesia Serikat (Desember 1949 - Agustus 1950)
- Dosen di Sesko Angkatan Darat, Bandung (1951-1961)
- Dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1954-1959)
- Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi (1969)
- Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila (1975)

B. Menguak Ideologi Bung Hatta

Ideologi umumnya sering diartikan sebagai sekumpulan ide, konsep bersistem dan sering pula dipahami sebagai paham, teori dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik. Kebersentuhan dengan ideologi merupakan soal yang sudah sangat tua, tergantung dari sudut mana mencoba mendekatinya. Dan, pengertian ideologi cenderung ditangkap dalam arti positif dan negative.

Di sisi lain, ideologi ditangkap dalam arti negative, karena dikonotasikan dengan sifat yang totaliter yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total, serta secara mutlak

menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang telah digariskan ideologi itu, sehingga akhirnya mengingkari kebebasan pribadi manusia serta membatasi ruang geraknya (Soerjanto Poespowardojo;1992). Namun apabila ditengok negara-negara yang mengalami masa-masa penjajahan bangsa lain, Ideologi merupakan pengertian yang positif terutama sekitar perang dunia ke II, karena menunjuk kepada keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang kongkrit. Ideologi dalam arti itu bahkan dibutuhkan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran dan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya serta antar kaitannya, dan menanamkan motivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan dan selanjutnya diwujudkan dalam sistem dan penyelenggaraan Negara. (Soerjanto Poespowardojo;1992).

1. Demokrasi

Cita-cita tentang keadilan sosial adalah sari pati dari nilai-nilai timur dan barat yang mengkristal dan membentuk visi Bung Hatta mengenai masalah-masalah politik kenegaraan. Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah hari depan sistem politik Indonesia. Demokrasi akan tersingkir sementara, tetapi ia akan kembali dengan tegapnya . memang tidak mudah membangun suatu demokrasi di Indonesia yang lancar jalannya, tetapi ia akan muncul kembali dan itu tak dapat di bantah. Kepercayaan yang mendalam kepada prinsip demokrasi inilah yang pernah menempatkan Hatta pada posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Hatta menilai sistem ini sebagai sistem otoriterian yang menindas demokrasi. Sekalipun pendapatnya berbenturan dengan Bung Karno, Hatta tetap saja memberikan *fair chance* kepada presiden untuk membuktikan dalam realitas.

Sekalipun tertindas, di mata Hatta demokrasi tidak akan pernah lenyap dari bumi Indonesia. Menurut Hatta ada tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. *Pertama*, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme,

sementara prinsip-prinsip ini dinilai juga sekaligus sebagai sebagai tujuan. *Kedua*, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. *Ketiga*, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa wilayah Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia. Baginya, suatu kombinasi organik antara tiga sumber kekuatan yang bercorak sosio religius inilah yang memberi keyakinan kepada Hatta bahwa demokrasi telah lama berakar di Indonesia tidak terkecuali di desa-desa. Bila di desa yang menjadi tempat tinggal sekitar 70% rakyat Indonesia masih mampu bertahan, maka siapakah yang meragukan hari depan demokrasi di Indonesia. Tetapi memang sia-sia, sistem feodal sering menggajal perkembangan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah Indonesia modern. Sesudah kemerdekaan dicapai dan dinikmati bangsa ini, Bung Hatta membuka peluang bagi pembelajaran demokrasi rakyat di Indonesia.

Bung Hatta sebagai wakil presiden memberikan kesempatan untuk berdirinya partai-partai politik yang akan mengikuti Pemilu pada 1955. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk menyalurkan aspirasi politiknya tanpa merasa takut. Akhirnya tidak kurang dari 39 partai mengikuti pemilihan umum yang dipandang sebagai Pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia modern. Pada saat yang bersamaan pula, Bung Hatta melihat bahwa partai-partai hanya berebut pengaruh untuk berkuasa. Partai-partai bahu membahu saling menyerang dan bertengkar secara tidak sehat. Para wakil yang duduk di pemerintahan pun lebih condong bersikap sebagai politisi dan oportunis, bukan negarawan.

Dimulai pada Periode demokrasi terpimpin sampai periode demokrasi Pancasila (Orde Baru) sama-sama ditandai oleh berlakunya sistem politik otoriterian dengan topangan subkultur neofeodalisme. Hatta sangat prihatin melihat perkembangan politik yang tidak sehat, tetapi regim menciptakan kedua sistem tersebut tidak mau 'mendengar' nasehat Hatta. Akhirnya mereka hancur lewat cara yang destruktif. Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden. Beliau melihat bahwa sejak penerapan sistem Demokrasi Liberal, jabatan wakil presiden

hanya pemborosan uang negara, karena kedudukannya yang tidak lebih dari simbol belaka.

Sekalipun di luar pemerintahan, Bung Hatta justru tetap selalu menjadi kekuatan moral demokrasi dan mengontrol jalannya roda pemerintahan. Bung Hatta, sebagai sahabat sejati Bung Karno, walaupun dalam beberapa hal sangat tidak sejalan, senantiasa mengingatkan Bung Karno, terutama terhadap perkembangan PKI yang begitu pesat sejak awal tahun lima puluhan. Bung Hatta cukup khawatir akan kebijakan Bung Karno yang terlalu memberi angin kepada PKI. Ketika Bung Karno menerapkan Demokrasi Terpimpin sejak 1959, Bung Hatta-lah orang yang paling gigih melakukan kritik. Ia menulis “Demokrasi kita” dalam majalah Panji Masyarakat yang dipimpin Buya Hamka. Menurutnya, Demokrasi Terpimpin adalah bentuk lain dari kediktatoran, yang kemudian tulisan (bukunya) tersebut peredarannya dilarang Bung Karno.

Bung Karno pun selalu diingatkan Bung Hatta untuk segera melaksanakan pembangunan, karena revolusi sudah selesai dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia 1945. Yang harus dilakukan sekarang adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Revolusi, jika tidak dibendung, hanya menghancurkan landasan dan bangunan, melepaskan engsel-engsel dan dinding-dindingnya. Pada saatnya akan mengakibatkan kekacauan belaka. Namun Bung Karno, dalam pidato-nya (Jalan Revolusi Kita), merespon Bung Hatta, menegaskan bahwa revolusi sebenarnya belum selesai. Kendati demikian, Bung Hatta senantiasa menempuh cara-cara legal dan konstitusional dalam rangka penegakan demokrasi. Beliau senantiasa tak berhenti menyampaikan kritik dan sarannya kepada Bung Karno.

Luar biasa memang, walaupun di antara kedua Proklamator ini terdapat perbedaan prinsip dalam pendirian mereka, namun hubungan persahabatan keduanya tetap hangat dan baik. Singkat cerita sekian tahun setelah Bung Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden, Bung Karno masih sempat mengunjungi Bung Hatta di rumahnya. Terlihat dan terlibat keakraban kedua peletak dasar Indonesia modern ini. Dalam suasana akrab tersebut, ketika akan makan malam, Bung Hatta juga

sempat “menyerang” keras kebijakan politik Bung Karno. Namun Bung Karno tidak tersinggung oleh kritikan dan saran Bung Hatta. Kritik dan nasehat Bung Hatta disampaikannya kepada Bung Karno sebagai seorang sahabat. Bung Hatta tak kunjung berhenti mengirim surat berupa nasehat kepada Bung Karno untuk kembali ke cita-cita Proklamasi Indonesia semula. Dalam menyampaikan nasehat dan kritik tersebut, beliau senantiasa menjaga hubungan baik di antara mereka dan tidak pernah melecehkan dan mengecilkan arti pribadi Bung Karno. Begitupun Bung Karno sekalipun mendapat kritik tajam, Bung Karno tetap menghargai Bung Hatta sebagai sahabat.

Begitulah kisah perjuangan Bung Hatta dalam meluruskan dan menegakkan demokrasi. Berbeda persepsi dalam penegakan demokrasi tidak harus diartikan sebagai permusuhan, apalagi tidak mau bertemu atau bersalaman. Sebagai seorang demokrat sejati, Bung Hatta berjiwa besar melihat perbedaan pendapat dan tidak hendak memaksakan keinginannya sendiri. Ketika melihat kenyataan politik yang tak sesuai dengan harapannya, Bung Hatta bukannya mendirikan partai politik tandingan untuk menggembosi pemerintahan, sebagaimana dilakukan oleh para politisi kita saat ini. Bung Hatta, melalui tulisan-tulisannya, memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia untuk meraih kebebasan yang merupakan salah satu pilar penting bagi tegaknya demokrasi, untuk tetap kritis terhadap ketidak-berdayaan dan berjuang membela rakyat dalam menegakkan demokrasi. Sehingga Kata Echols (1981: 173)” the democratic ways of the Bung Hatta made people like him “ (perlakuan demokrasi Bung Hatta menyebabkan Bung Hatta disukai banyak orang)

Menurut Bung Hatta, demokrasi sudah ada sejak dari desa. Bung Hatta berpendapat dalam Padma Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut “demokrasi asli”. Demokrasi desa memiliki lima unsur yaitu

- a) rapat
- b) mufakat
- c) gotong-royong

- d) hak mengadakan proses bersama
- e) hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolut

Demokrasi Indonesia modern menurut Moh. Hatta harus meliputi tiga hal, yaitu

- a) demokrasi di bidang politik
- b) demokrasi di bidang ekonomi
- c) demokrasi di bidang social

Bung Hatta, sebagai salah seorang *founding father* Indonesia, melihat demokrasi itu tidak selalu demokrasi politik, melainkan juga demokrasi ekonomi. Apa yang beliau maksud dengan demokrasi ekonomi oleh Bung Hatta ?. Menurutnya, demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. “Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia,” paparnya sebagaimana dikutip Yudi Latif.

Hatta menolak untuk mengikuti demokrasi liberal sebagaimana berkembang di Barat. Menurutnya, demokrasi ala Barat yang dipancarkan melalui revolusi Perancis pada abad ke-18 membawa masyarakat Perancis pada demokrasi politik *ansich* yang pada level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuis dan menepikan masyarakat jelata. Demokrasi seperti itu, jelas Hatta, tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya perikemanusiaan dan keadilan sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Mohammad Hatta menghendaki karakter utama demokrasi ekonomi Indonesia terletak pada tiadanya watak individualistik dan liberalistik dari jiwa perekonomian Indonesia (Revrisond Baswir, 2009 : 40). Secara makro hal ini diterjemahkan dengan menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional serta diikuti sertakannya semua pihak yang memiliki kepentingan dalam lapangan koperasi, termasuk para pekerja dan konsumen koperasi untuk turut bergabung menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, pelembagaan

kedaulatan ekonomi rakyat sebagai wujud demokrasi ekonomi dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang atau individu, hanya bisa diwujudkan dengan menyusun perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pemikiran Bung Hatta dan para pendiri bangsa telah tertuang ke dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 33. Ayat (1) pasal 33, menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (3), menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hubungan ini, sesuai dengan konstitusi, hadir peran negara dalam rangka menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi di Indonesia

B. Konsep Kebangsaan

Bagi Bung Hatta, tidak ada pergerakan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan. Artinya, perjuangan anti-kolonial apapun, sekalipun bercita-cita pada pembebasan manusia seutuhnya, tetap harus berpijak pada semangat kebangsaan. Bung Hatta bahkan menegaskan, “cita-cita kepada persatuan hati dan persaudaraan segala bangsa dan manusia adalah bagus dan baik, akan tetapi, supaya tercapai maksud itu, haruslah dulu ada kemerdekaan bangsa.”

Artinya, kata Bung Hatta, hanya bangsa-bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka yang bisa bersaudara. “Tuan dan budak susah mendapat persaudaraan, kan?” gugat Bung Hatta. Dengan demikian, persaudaraan atau *humanisme seutuhnya* pun tidak mungkin terwujud jikalau masih ada penindasan bangsa atas bangsa.

Kata-kata Bung Hatta ini menohok langsung pendirian kaum internasionalis maupun penganut humanisme universal, yang selalu menegaskan antara kebangsaan bagi kaum bangsa terjajah dan internasionalisme. Sebaliknya, Bung Hatta beranggapan, perjuangan kebangsaan bagi bangsa terjajah merupakan upaya pemulihan rasa kemanusiaan itu sendiri. Maklum, kolonialisme menginjak-injak martabat manusia.

Betapapun, Bung Hatta juga menyadari, ekspresi kebangsaan itu tidaklah tunggal. Ia sangat tahu, terkadang semboyan “membela kehormatan bangsa” digunakan oleh klas tertentu, termasuk kaum borjuis, untuk kepentingan ekonomi-politiknya. “Rakyat yang banyak hanya dipakai mereka sebagai perkakas saja. Rakyat menderita azab dunia di atas medan peperangan, menjadi umpan pelor dan gas racun,” kata Bung Hatta.

Bung Hatta pun membagi semangat kebangsaan dalam tiga kategori yaitu ada kebangsaan ningrat, kebangsaan intelek, dan kebangsaan rakyat. Tiga kategori ini pernah eksis dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa di dunia. Kebangsaan ningrat berarti kebangsaan yang menempatkan kaum ningrat di puncak kekuasaan. Artinya, sekalipun jumlah rakyat berlimpah-limpah, tetapi yang diakui keberadaannya hanya kaum ningrat. Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, kaum ningrat berkeinginan memegang kendali politik.

Kemudian, ada kebangsaan kaum intelek. Menurut cita-cita kebangsaan ini, kaum intelektual-lah yang harus memegang kekuasaan pasca Indonesia merdeka. Sebab, bagi mereka, negara ini tidak akan maju dan makmur kalau tidak dikemudikan oleh kaum intelektual. Memang, konsep kebangsaan ini menolak keras model kekuasaan turun-temurun menurut garis keturunan. Sebaliknya, mereka mengajukan bahwa hanya orang-orang cakap-lah yang pantas memimpin. Selain itu, seperti dijelaskan Bung Hatta, konsep ini sangat meremehkan rakyat jelata. Bagi mereka, rakyat miskin itu lebih banyak bekerja untuk mencari nafkah hidup, sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan politik. Karena itu, mereka tak usah diberi ruang untuk mengurus kehidupan negeri. Mereka cukup mengikut saja.

Bung Hatta menolak dua konsep kebangsaan di atas. Ia lebih tertarik pada konsep kebangsaan ketiga, yakni kebangsaan rakyat. Bagi konsep ini, kebangsaan apapun tidak akan berguna tanpa adanya rakyat. Pemerintahan yang berjalan mestilah berdasarkan kemauan atau kehendak rakyat. Pendek kata, konsep ini menempatkan rakyat di atas singgasana kekuasaan.

Konsep kebangsaan Bung Hatta meletakkan rakyat sebagai *protagonis*-nya. Ia meletakkan rakyat sebagai dasar dari eksistensinya bangsa itu sendiri. Memang, tak ada bangsa tanpa rakyat. “Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun,” tandasnya. Bangsa adalah kumpulan manusia yang tersusun sekaligus terbelah. Ada bangsa, seperti Indonesia, berhasil disusun dari keragaman suku, agama, dan adat-istiadat. Namun, pada aspek lain, masyarakat Indonesia itu terbelah dalam klas-klas. Dengan demikian, bangsa bukanlah sebuah komunitas yang stabil.

Tetapi Bung Hatta juga Bung Karno sudah menyadari keadaan itu. Karena itu, dalam menyusun konsep kebangsaannya, Bung Hatta memperlihatkan keberpihakan yang jelas dan tegas kepada rakyat banyak. Bung Hatta, seperti juga Bung Karno, tidak menghendaki Indonesia merdeka jatuh ke tangan ningrat, borjuis, ataupun di tangan segelintir kaum intelektual. Bung Hatta menghendaki agar Indonesia merdeka jatuh di bawah kekuasaan rakyat.

Konsep kebangsaan Bung Hatta tidaklah bervisi pendek. Ia tak sekedar mengejar kemerdekaan. Akan tetapi, kebangsaan Bung Hatta menghendaki sebuah masyarakat yang bisa menegakkan kemanusiaan setinggi-tingginya, tanpa diganggu oleh penghisapan dan penindasan dalam bentuk apapun.

2. Ekonomi Kerakyatan.

Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara. Dalam disertasi ini Fadli Zon mengkaji tiga hal, yaitu proses pembentukan gagasan ekonomi kerakyatan, hal-hal yang mempengaruhi pemikiran ini, dan hambatan pengimplementasian gagasan ini dalam program pembangunan ekonomi nasional kita. Menurut Fadli, konsep ekonomi kerakyatan sangat dipengaruhi oleh tiga jenis tradisi, yaitu tradisi Minangkabau yang merupakan asal tempat Hatta, tradisi Islam, dan tradisi Eropa.

Dinamika politik internasional pada awal abad ke-20 seperti kebijakan politik etis Belanda, kekalahan Rusia atas Jepang, Revolusi Komunis, dan Depresi Besar

Eropa juga turut mempengaruhi proses pemikiran Hatta dalam melahirkan gagasan ini. Semua peristiwa-peristiwa besar dunia ini akhirnya mendorong Hatta melahirkan sebuah pemikiran bahwa bukan “isme-isme” bangsa Eropa yang akan menolong Indonesia, tapi pemikiran atau “isme” yang digali dari kehidupan dan kebudayaan Indonesia sendirilah yang akan melakukannya.

Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi “jalan tengah” yang digagas Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Konsep ini diejawantahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Kegagalan konsep ekonomi kerakyatan ini justru lahir dari perubahan regulasi yang memudahkan semangat egaliter koperasi. Regulasi yang akhirnya menempatkan koperasi hanya sekedar sebagai badan usaha membuatnya menjadi tidak bisa berkembang seperti koperasi negara lainnya, seperti Saemaul Undong di Korea Selatan, ataupun Federal Land Development Authority (FELDA) di Malaysia.

Selain itu, konstelasi politik pada saat Hatta hidup juga tidak memungkinkan penerapan gagasan Hatta dijalankan dengan baik. Seperti telah tercatat sejarah, Hatta lebih dikenal sebagai seorang negarawan intelektual, tanpa peranan yang cukup berpengaruh dalam partai politik manapun pada saat itu.

BAB III

Pemuda Indonesia dan Politik



A. Bung Hatta Muda Berpolitik.

Pada bab tiga ini sengaja nukilan pembelaan Buñg Hatta di depan pengadilan Den Haag, 9 Maret 1928 dijadikan sebagai potret (ilustrasi behavioristik) ketika Bung Hatta berpolitik melawan imperialisme Belanda.

Tuan Ketua, tuan-tuan hakim yang mulia!Ketika Redaksi “Indonesia Merdeka” (media yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia)pada tahun 1924 menulis sebuah pengantar untuk tahun yang baru, maka dicatatnyasebagai berikut:“Indonesia Merdeka” telah menjadi suara pelajar Indonesia Muda. Mungkin suara ini belum terdengar oleh pihak penguasa, tapi pada suatu waktu, suara itu pasti akan tertangkap. Suara itu tidak dapat diabaikan begitu saja, karena di belakangnya berdiri suatu kemauan yang keras untuk merebut kembali dan mempertahankan hak-hak tertentu, yakni agar dibentuk suatu Negara Indonesia Merdeka, cepat atau lambat!”

Redaksi tidak menyangka, bahwa suara itu akan menggema dengan begitu cepat di kalangan penguasa. Redaksi lebih-lebih lagi tidak menduga, suara itu dengan secepat itu pula akan ditangkap dan akan diadili. Maka kini sayaberdiri di hadapan Tuan Ketua dan tuan-tuan hakim yang mulia untuk memberikan pertanggung jawaban tentang asas dan tujuan Perhimpunan Indonesia, dan untuk membela dan membenarkan asas dan tujuan itu, dilihat dari pendirian saya.

Saya (Bung Hatta) membatasi diri pada penguraian asas dan tujuan Perhimpunan Indonesia, sambil memberikan analisa daripada faktor-faktor politik dan psikologis yang berpengaruh pada jalan yang ditempuh oleh perkumpulan itu.

Saya akan menandaskan uraian saya sebanyak mungkin dengan ucapan-ucapan resmi dari Perhimpunan Indonesia, seperti yang terbaca dalam majalah “Indonesia Merdeka”. Dengan mengutip ucapan-ucapan itu kiranya orang tidak dapat menuduh saya tidak menggambarkan dengan teliti jiwa yang hidup dalam organisasi tersebut.

Tuan Ketua! Pertama-tama saya mempersoalkan pertanyaan yang ada sangkut-pautnya dengan faktor psikologis yang umum ini: apa sebabnya pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, secara aktif ikut berpolitik? Karena di negara-negara Barat hal itu dianggap tidak normal, suatu gejala yang tidak sehat! Sebagian orang mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh pengaruh Barat. Namun gejala itu pada umumnya tidak tampak di negara-negara Barat. Maka itu bukan merupakan suatu akibat yang mutlak dari peradaban-peradaban Barat di Benua Eropa, sebagian daripada angkatan muda yang terbaik, yang belajar di sekolah-sekolah tinggi, menaruh minat besar pada semua masalah sosial dan kemasyarakatan, tidak secara aktif tapi hanya secara abstrak. Di Barat, pemuda-pemuda intelektual pada universitas-universitas mempersiapkan diri untuk kegiatan di bidang politik dan kemasyarakatan di kemudian hari. Di Indonesia, kegiatan itu sudah dimulai tatkala pemuda-pemudanya masih duduk di bangku sekolah. Organisasi-organisasi pemuda seperti “Jong Java”, “Jong Sumatranen Bond”, “Jong Minahasa”, “Jong Ambon”, “Jong Islamieten Bond”, “Indonesia Muda” dan lain-lain, semua organisasi itu lahir dalam ruangan kelas sekolah-sekolah menengah.

Mengapa demikian? Untuk dapat mengerti kenyataan itu, haruslah diingat, bahwa pemuda-pemuda tidak mendidik diri sendiri. Melainkan dididik dalam kondisi dan situasi dimana ia tumbuh berkembang, dan dalam masyarakat di mana ia berada. Dalam masyarakat kolonial, pemuda itu cepat sekali mengalami kenyataan yang keras dan pahit. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kesengsaraan yang diderita oleh massa rakyat yang tertindas. Ia melihat bagaimana massa rakyat itu bermula menerima saja nasibnya yang nestapa itu, bagaimana selama berpuluh-puluh tahun ia menyerah saja pada siksaan-siksaan dan suatu sistem yang pada suatu waktu pasti akan tenggelam. Pemuda itu merasakan dan mengerti duka dan sengsara rakyat.

Itulah sebabnya mengapa hampir semua organisasi pemuda di Indonesia mencantumkan dalam programnya tujuan sebagai berikut: Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat. Dalam segala kejujurannya, pemuda-pemuda itu menyadari sepenuhnya penindasan rakyat oleh pemerintah asing. Pemuda-pemuda itu benar-benar merasakan hinaan karena dijajah. Mass-media penguasa kulit putih, dan tindakan mereka yang angkuh terhadap bangsa yang diajah, mengingatkan pemuda-pemuda itu betapa nistanya rakyat yang tidak merdeka. Itu sebabnya putera-putera bangsa yang tidak merdeka itu, sejak usia mudanya, telah bergumul dengan pikiran-pikiran yang tidak dialami oleh pemuda-pemuda Barat yang sebaya mereka.

Walaupun demikian, Tuan Ketua, ada lagi faktor yang menyebabkan mengapa angkatan muda Indonesia masuk gelanggang politik begitu lekas. Di negeri ini (Belanda) sering orang bertanya dengan heran: mengapa pemuda-pemuda Indonesia itu membuat hidup mereka begitu sukar, dan memusingkan kepala dengan bermacam-macam masalah politik dan kolonial? Mengapa tidak memuaskan dahaga remaja dan menikmati keindahan masa mudanya? Mengapa mereka begitu rewel dan tidak pernah puas? Bukankah mereka umumnya (orangtuanya) berasal dari kalangan pegawai yang tinggi atau dari kelas masyarakat yang berada?

Jawabnya menurut Bung Hatta tersimpul pada pertanyaan itu sendiri! Karena justru di kalangan pegawai yang tinggi dan masyarakat kolonial itu sendiri seringkali tampak dengan nyata, bahwa suatu prinsip pokok dalam kehidupan kolonial adalah bersikap tidak jujur. Sifat sistem kepegawaian kolonial memaksa pejabat-pejabat Indonesia untuk berdiam diri, atau berbohong, atau berbicara yang enak-enak saja tentang masalah politik dan kolonial. Pejabat-pejabat itu terus-menerus diingatkan, bahwa tidaklah pantas untuk mengecam administrasi kolonial, dimana mereka sendiri merupakan satu bagian. Maka dalam kalangan-kalangan yang tinggi yang katanya memimpin masyarakat Indonesia, para pemuda melihat bapak mereka sebagai lambang ketidakjujuran abadi. Terserah pada sifat sang anak, apakah akan meniru sifat ayahnya dan tindakan yang sehari-hari menjemukan menjalankan dengan patuh semua perintah dan atasan, menanggalkan setiap cita-cita apalagi memupuknya, dan

hanya memikirkan karier dan bagaimana memuaskan nafsu, ataubila kecondongan akan kejujuran sangat besar, dan “pengaruh-pengaruh buruk” akan pikiran tentang kemerdekaan kuat sekali, mereka memikirkan nasib massa rakyat dan menyiapkan diri untuk suatu konsekuensi yang memutuskan tali ikatan kekeluargaan. Adalah ironi nasib, bahwa keadaan dalam masyarakat jajahan paling hebat dikecam oleh anakanak muda yang berasal dari kalangan priyayi itu sendiri. “Tidak tahu berterimakasih atau kurang Setia? Sama sekali tidak! Hati nurani nasional berbicara lebih keras daripada suara ikatan kekeluargaan! Dan ada bahaya bahwa di masa depan, di bawah pengaruh patriotisme, ikatan-ikatan mesra akan menjadi putus, hubungan kekeluargaan dicabik-cabik, dan hubungan persahabatan yang pribadi sekali dihentikan. Oleh karena semua motif kepentingan diri pribadi dan pertimbangan-pertimbangan pribadi harus menyingkir untuk cita-cita kebangsaan..”

Tak ada kesempatan lewat untuk menyadarkan mereka, bahwa mereka bukanlah merupakan sebagian dan bangsa “Inlander kotor”. Sampai muak kami mendengar dan membaca berbagai penamaan (sebutan) rendah bagi bangsa kami yang diucapkan atau ditulis orang-orang yang katanya “beradab”, yang bukan saja menganggap diri-sendiri sebagai tuan besar- tuan besar di negeri kami, tapi juga memperkaya diri dengan harta yang dihasilkan dengan keringat dan darah si Kromo yang miskin. Kepada kami dilemparkan, bahwa “si Inlander orang malas, jorok, tak dapat dipercaya, curang, tak tahu berterima kasih, serampangan, tak punya kebutuhan apapun.” Ia kekurangan energi, tak tahu berhemat, tak punya kesadaran ekonomis, dan entah apa lagi.

Hinaan-hinaan itu dilontarkan dengan sengaja dan sadar untuk menyakiti perasaan halus kami. Setiap hari kami diingatkan dengan cara kasar demikian, bahwa kami tergolong sebagai bangsa yang dijajah dan karena itu merupakan bangsa yang derajatnya rendah; terhadap bangsa yang demikian, maka segala-galanya boleh saja dilakukan. Dapatlah dimengerti kalau hinaan yang demikian dan segala cemooh, yang besar dan maupun yang kecil, yang setiap hari kami alami, tidak lain hanyalah membentuk pada diri kami sikap yang bermusuhan terhadap si penjajah. Dan

demikianlah maka anak-anak muda Indonesia diharuskan membeo guru-gurunya dan menganggap pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, dan banyak lainnya sebagai para pemberontak, pengacau, bandit, dan entah apalagi.

Tuan Ketua! Angkatan muda Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat jajahan ini, masyarakat yang mengenal pertentangan ras yang tajam dalam dan dalam suasana penuh pembencian ras dan penghinaan. Sejak dari usia kecil, pemuda Indonesia membawa sepotong pengalaman kolonial yang dipikulnya sepanjang hidupnya. Hanya mereka yang memikirkan masa depannya sendiri, kebahagiaannya sendiri, dan bersedia melepaskan semua cita-cita sajalah yang mau melupakan semua itu, dan dengan demikian memupuk moral-budak dalam diri mereka.

Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang datang memperkokoh barisan Perhimpunan Indonesia, pernah menjadi anggota-anggota organisasi-organisasi pemuda di Tanah Air dan berhubung itu mereka mengenal situasi di Indonesia. Dengan pengalaman kolonial dan kepahitan dalam hati, mereka datang kemari, ke negeri penjajah. Kalau sebelumnya mereka hanya mengenal nista dan hinaan dan selalu merasakan udara sesak di sekitar mereka, maka kini terbukalah mata dan hati mereka melihat masyarakat baru dimana mereka setidak-tidaknya dalam teori dalam praktek bisa lain, terbukti dari proses sensasional melawan kami sekarang inidilindungi oleh undang-undang yang sama, dengan hak kewarganegaraan yang sama dengan orang-orang yang bertingkah sebagai majikan yang superior sewaktu berada di Tanah Air. Seolah langit lain mengembang di atas kepala mereka.

Di sini mereka merasakan artinya Merdeka, mereka merasa terlepas dari kungkungan suasana yang sempit dan menyesak dan masyarakat kolonial. Hal ini memperkuat dalam diri mereka suatu kesadaran akan panggilan untuk menjadi pemimpin rakyat kelak. Itu sebabnya maka ada kesadaran bahwa selagi masih menjadi mahasiswa mereka perlu mempersiapkan diri untuk tugas di kemudian hari.

Dengan demikian, alasan daripada aksi kami ini bukanlah seperti yang digambarkan oleh “de Locomotief” (sebuah koran yang terbit di Belanda), bahwa kami hilang keseimbangan setelah direnggut dan masyarakat sendiri dan ditempatkan dengan tiba-tiba di tengah-tengah kehidupan Barat.

Tidak, tuan Ketua! Bukan itu sebabnya! Benar, kami telah bebas dari hypnose kolonial, dan karena itu menjadi sadar akan diri sendiri. Dari sini kami dapat melihat kenyataan kolonial dengan jelas. Dan aksi kami didasarkan atas penglihatan itu. Dengan mempelajari dan menganalisa problem kolonial itu, pemuda Indonesia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikatakan oleh firasatnya dan dirasakannya dengan pengalamannya sendiri, yakni bahwa tujuan kolonialisasi adalah semata-mata memuaskan kehausan akan materinya dengan harta jajahannya yang kaya. Bukan untuk mengantarkan peradaban Barat kepada bangsa yang dijajah, seperti sering diutarakan dengan licik. Oleh karena tidak pernah penjajahan dimulai untuk mengabdikan pada filantropi (cinta sesama manusia), untuk memenuhi hasrat mendidik dan membimbing bangsa-bangsa yang kurang “beradab”.

Sebagai putera Tanah Air, pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di sini merasa diri sebagai pengemban tugas yang mulia. Rakyat Indonesia akan meletakkan kepercayaannya pada mereka dan akan mencari perlindungan pada mereka. Pemuda-pemuda itu merasakan betapa baiknya tugas kaum intelektual muda dari suatu negeri yang diperintah dan dikuasai oleh bangsa asing, yang berasal dari ras yang lain. Panggilan pertama adalah haruslah menyadarkan bangsa tentang betapa nistanya hidup terjajah; mereka harus mencetuskan dorongan untuk kemerdekaan dalam jiwa rakyat dan dengan demikian benar-benar mengajarkan rakyat untuk menghargai milik kemanusiaan yang terbesar: kemerdekaan nasional.

Kesadaran yang mendalam, bahwa kemerdekaan Tanah Air hanya dapat dicapai dengan tenaga dan kekuatan sendiri, dan kesadaran akan panggilan Untuk memimpin bangsanya dan kegelapan menuju ke dunia yang terang, semua itu telah membangkitkan kerelaan pada banyak mahasiswa Indonesia di negeri ini untuk mengesampingkan kepentingan sendiri, dan mengorbankan diri pribadi. Maka, berada

di negeri ini atau pusat ilmiah lam di Eropa, tidak semata-mata berarti belajar dan menambah pengetahuan yang menjamin kepada mereka suatu posisi yang baik dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi Ia juga berarti melatih diri secara politis, mempersiapkan diri untuk tugas mulia di hari depan. Benar, Tuan Ketua, kata-kata ini tidak berlaku buat semua orang Indonesia yang datang belajar ke sini; karena sebagai saya singgung tadi, masih banyak yang hanya memikirkan karier saja, dan sebab itu sama sekali tidak memupuk atau mengemban cita-cita apapun.

Namun bagi Perhimpunan Indonesia, perkumpulan daripada bagian terbaik pemuda Indonesia yang belajar di sini, berlaku prinsip yang diuraikan di atas, yakni bahwa kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan Tanah Air dan kebahagiaan rakyat. Bagian dan mahasiswa Indonesia yang belajar di sini inilah yang menyadari sepenuhnya akan panggilannya! Namun lihatlah pula, mengapa angkatan muda Indonesia yang belajar di sini, aktif ikut berpolitik! Dengan demikian Indonesia Merdeka juga menulis sebagai berikut: “Terharu oleh kejadian-kejadian di Tanah Air, orang-orang Indonesia yang berada di Nederland tidak dapat lebih lama lagi bersikap masa bodoh. Mereka adalah mahasiswa, tapi lebih dari itu, lebih dari segala-galanya, mereka adalah putera Indonesia. Kepentingan Tanah Air mencekam dalam hati mereka. Perhimpunan Indonesia hanyalah suatu “pos terdepan” daripada gerakan rakyat Indonesia. Sebagai “barometer yang peka”, Perhimpunan Indonesia memberikan reaksinya atas gejala-gejala politik dan ekonomis. Adalah bodoh untuk mengatakan, bahwa Perhimpunan Indonesia berada di bawah pengaruh Sekolah Tinggi Leiden.

Perhimpunan Indonesia hanya memerankan apa yang secara jasmani dan rohani diemban oleh berjuta-juta kawan seperjuangan di Indonesia, yakni cinta Tanah Air. Terdorong untuk bertindak dan sadar bahwa hanya persatuan yang lebih beratlah yang akan dapat merebut kemenangan, maka ia menyatakan dirinya solider dengan massa-aksi yang dilakukan di Tanah Air.” (Indonesia Merdeka, No.3, Th. 1924, hal.37 dan seterusnya).

B. Aksi Perhimpunan Indonesia.

Tuan Ketua! Setelah saya uraikan faktor-faktor yang menerangkan mengapa pemuda Indonesia sejak pagi-pagi sudah turun ke gelanggang politik, maka sampailah saya kini pada bab Perhimpunan Indonesia. Akan saya lukiskan di hadapan sidang pengadilan ini tentang pertumbuhan dan perkembangan Perhimpunan Indonesia, pokok-pokok prinsipnya dan aksi-aksinya! Nama asalnya adalah "*IndischeVereniging*". Ia didirikan di negeri ini pada tahun 1908, jadi pada tahun yang sama dengan lahirnya di Indonesia perkumpulan "Boedi Oetomo". Boedi Oetomo didirikan di dalam ruang sekolah "Stovia" di Weltevreden (Jakarta). Baik Boedi Oetomo maupun Perhimpunan Indonesia pada asalnya adalah organisasi-organisasi mahasiswa. Ingin saya meminta perhatian Tuan, bahwa organisasi-organisasi kebangsaan Indonesia yang paling tua justru merupakan organisasi-organisasi mahasiswa. Ini adalah gejala normal dalam tiap negeri yang dijajah dan pada rakyatjajahan!

Namun perkembangan Boedi Oetomo dan Perhimpunan Indonesia selanjutnya tidak berjalan sejajar. Boedi Oetomo tetap setia pada pola aslinya, yakni suatu perkumpulan orang-orang intelek asal Pulau Jawa, sedangkan Perhimpunan Indonesia tetap merupakan organisasi mahasiswahal ini tidak mengherankan karena perkumpulan ini berada jauh dan Tanah Airlambat laun berkembang: dan perkumpulan untuk bersenang-senang menjadi perkumpulan yang nasionalis-radikal, dengan kecondongan-kecondongan politik; iia adalah suatu organisasi yang menganjurkan kepada para anggotanya agar kelak,. apabila telah kembali ke Indonesia, mereka akan turun ke massa dan berjuang bersama-sama massa itu.

Perkembangan Perhimpunan Indonesia dapat dibagi dalam tahap-tahap berikut: Pertama: 1908 – 1913, Kedua: 1913 – 1919, Ketiga: 1919 – 1923, Keempat: 1923 - sekarang (1928). Ciri tahap pertama adalah mencari-cari arah. Berdirinya Indische Vereniging itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh terasanya kebutuhan orang-orang Indonesia di perantauan untuk berkumpul, daripada karena kesadaran akan panggilan

untuk mengemban tugas bersejarah! Itulah sebabnya mengapa tujuan utamanya adalah seperti yang tercantum pada pasal 2 Anggaran Dasarnya:

“Memajukan kepentingan bersama daripada orang-orang Hindia (Indonesia) di Nederland, dengan memelihara hubungan Hindia-Belanda”.

Suara dalam rapat-rapat perkumpulan dengan sendirinyajuga lunak sekali. Namun, walaupun pada umumnya ia merupakan suatu perkumpulan untuk kerukunan, dalam dirinya ada semacam benih patriotisme. Perkumpulan tidak dapat terus menutup mata dan telinga terhadap kejadian-kejadian di Asia Timur. Tak lama kemudian pasal 2 Anggaran Dasar diubah, dimana disebutkan bahwa selain mengusahakan kerukunan yang lebih erat, juga harus menumbuhkan rasa solidariteit, kesetiakawanan di antara orang-orang Indonesia yang belajar di Nederland, jadi memupuk perasaan bahwa mereka tergolong pada masyarakat yang satu dan sama.

Dengan demikian gagasan Indonesia Raya telah menyelinap ke dalam perkumpulan. Namun, baru pada tahun 1913 datanglah angin segar dalam “Indische Vereniging” itu. Pada waktu itu datang ke Nederland sebagai orang buangan, Raden Mas Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Tjipto Mangunkoesoemo dan Douwes Dekker, yang merupakan korban peringatan Seratus Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda. (Ingat tulisan Ki Hajar yang membuat marah penguasa kolonial: “Seandainya aku orang Belanda”). Periode 11 dan Perhimpunan Indonesia mulailah. Munculnya Suwardi merubah dengan seketika suasana dalam rapat-rapat, yang biasanya mendapat kunjungan dan penasehat-penasehat yang terdiri dari orang-orang Belanda. “Memang benar, nada tetap hormat dan sopan, tapi tidaklah dapat disangkal akan adanya kegetiran di dalamnya. Dan itu tidaklah mengherankan. Bukankah Suwardi yang harus mengalami, bahwa dalam daerah jajahan, di mana kekuasaan harus dijunjung tinggi, tangan penguasa tanpa ampun mencekik siapa saja yang menyangka bahwa ia harus meniupkan kesadaran berpolitik?”

Dengan lambat tapi pasti, unsur “politik” yang begitu ditakuti itu menyelip ke dalam organisasi. Bagi orang-orang Belanda donatur organisasi yang sudah berapa

lamanya menyaksikan proses ini berlangsung dalam rapat-rapat perkumpulan, hal ini merupakan isyarat untuk keluar dan IndischeVereniging tersebut.

Tuan Ketua! Orang melihat, sejauh mana kecondongan-kecondongan orang-orang Belanda yang dikatakan beritikad baik itu, untuk membantu memajukan “saudara-saudara mudanya yang berkulit coklat!” Simpati orang-orang Belanda ini terhadap tujuan Indonesia berakhir bilamana yang dibicarakan adalah politik, ya bahkan sekalipun politik itu diungkapkan dalam bentuk yang loyal, seperti halnya dengan Indische Vereniging dahulu itu. Orang tidak boleh berbicara tentang kemerdekaan Indonesia! Namun setelah sekali terdorong ke dalam jalur politik, maka Indische Vereniging tidak bisa lagi keluar dan jalur itu.

Tuan Ketua! Adalah juga pada zaman bergejolak itu, pada musim gugur tahun 1917, maka tokoh-tokoh penting dan organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda dan Tionghoa telah berkumpul dan membicarakan kemungkinan untuk membentuk suatu perkumpulan umum yang mencakup semua pihak, dan yang akan mempersiapkan diri untuk lingkungan kerja di Indonesia. Maka terbentuklah IndonesischVerbond. Karena orang-orang Belanda dalam IndonesischeVerbond, kecuali satu dua orang, tidak akan menghendaki penghapusan penjajahan itu; paling-paling mereka akan menerimanya sebagai suatu akibat yang tak terelakkan, berkat hukuman yang keras dan sejarah dunia.

Demikianlah keadaan pada awal tahap ketiga (tahun 1919). Anggota-anggota baru perkumpulan yang mengawali tahap ini, ternyata merupakan katalisator dalam proses perombakan yang telah mulai dengan datangnya SuwardiSurjaningrat dan kawan-kawan. indischeVereniging itu sudah di ambang pintu mawas diri secara nasional. Perlu mendapat perhatian kita, bahwa Indische Vereniging berkembang sesuai dan sejajar dengan perkembangan Gerakan Rakyat di Tanah Air! Persamaan ini sampai mencetuskan ucapan seorang bekas Ketua Indische Vereniging yang berkata bahwa perkumpulan adalah suatu “barometer peka daripada kejadian-kejadian besar di Hindia.”

Semangat dalam Indonesisch Verbond sudah mengendor ... karena kecewa oleh hasil-hasil negatif kerjasama tersebut, maka muncul kepercayaan pada diri sendiri pada Indische Vereniging. Namanya juga sudah dirubah menjadi “Indonesische Vereniging” (1922). Nama baru itu sekaligus meliputi nama politik yang diberikan kepada Tanah Air. Sebagai konsekuensi daripada keputusan ini, maka redaksi majalah “Hindia Poetra” telah mengajukan usul perubahan nama majalah menjadi “Indonesia Merdeka”, dan usul tersebut diterima dengan baik oleh rapat umum anggota. Dengan demikian, maka nama majalah kini menunjuk jelas pada tujuan organisasi: Indonesia Merdeka!

Akhirnya, pada musim gugur tahun 1923, karena jemu dengan kerjasama yang tak berbuah sedikitpun dalam Indonesisch Verbond tersebut, maka Indonesische Vereniging mengambil keputusan untuk keluar dari Verbond tersebut. Indonesische Vereniging mempunyai keyakinan, bahwa rakyat Indonesia hanya dapat memperoleh hak itu jika sanggup mengajukan pertanyaan kekuasaan. Kepercayaan Indonesische Vereniging pada pihak penjajah sudah hilang lenyap. Kepercayaan atas diri sendiri semakin menebal. ini semua menuju pada penerimaan prinsip non-cooperation (prinsip nonkooperasi). Dengan menerima baik prinsip ini, maka mulailah tahap keempat! Dalam periode ini pula maka dirubah nama perkumpulan menjadi “Perhimpunan Indonesia”.

***Asas-asas Perhimpunan Indonesia dan Alasannya**

Tuan Ketua! Seperti yang saya uraikan, orientasi baru Perhimpunan Indonesia dimulai dengan menerima prinsip nonkooperasi. Dengan prinsip baru itu ia berhenti memohon belas kasihan dan bangsa Belanda. Ia tak lagi menadahkan tangan, suatu sifat yang jelek, untuk memohon kebaikan hati bangsa lain. Sejak saat itu Perhimpunan Indonesia ingin menjalankan politik yang berdiri atas tenaga sendiri, percaya pada kekuatan sendiri. Perasaan menghargai diri sendiri ini, ingin ditekankannya kepada bangsa Indonesia. Karena “suatu bangsa yang telah menanggalkan rasa tergantungnya pada bangsa lain, tidak usah cemas atas masa depannya. Karena bagi suatu bangsa yang kenal harga diri, terdapatlah titik terang.”

Jadi Perhimpunan Indonesia mau mendidik bangsanya sendiri, mau menegakkannya atas kekuatan sendiri. Mengenai hal ini, “Indonesia Merdeka” menulis demikian: “Penjajahan telah menyebabkan kehidupan Indonesia menjadi berantakan; Ia mencekik ungkapan-ungkapan vitalitasnya. Sumber-sumber kesejahteraan bangsanya semua tersumbat. Struktur rohani bangsa kami berubah. Kepribadiannya untuk sementara hancur.

Dalam segi pengajaran dan pendidikan, kami harus berusaha memulihkan kepribadian itu. Bagaimana? Tidak dengan mengharapkan keuntungan yang diragukan, yang diperoleh atas kerjasama dengan pihak penjajah. Unsur kepercayaan pada diri sendiri tidak kita peroleh dengan memakai perantara, tapi hanya diperoleh secara langsung, lepas dan bantuan apapun dan luar. Hanya dengan menyalurkan kesanggupan bangsa kita dan bawah sadar kepada kesadarannya. Dalam bahasa yang lebih jelas: bangsa kita harus tahu, bahwa ia sanggup membuat sesuatu yang besar. Tenaga-tenaga latentnya yang tersimpan harus dapat dikerahkannya. Ia harus diingatkan kembali akan masa lampaunya yang cemerlang; tapi yang terpenting adalah merangsang gairahnya untuk bergerak.

Populernya Perhimpunan Indonesia di tengah-tengah bangsa Indonesia, khususnya di antara kaum intelektual Indonesia, terutama sekali telah disebabkan oleh caranya dalam menanggapi prinsip nonkooperasi. Meskipun gerakan nonkooperasi di Indonesia pada asalnya hanya dimaksudkan sebagai protes terhadap tidak ditepatinya Janji November 1918, dan karena telah dikesampingkannya kepentingan-kepentingan rakyat yang paling vital oleh pemerintah, Perhimpunan Indonesia segera mengerti, bahwa nonkooperasi adalah suatu unsur penting dalam perjuangan bangsa yang bergerak ke arah kemerdekaannya, yaitu unsur menghargai diri sendiri. Berkat pengalaman-pengalamannya yang pahit dalam kerjasama dengan Indonesia Verbond dan berkat pengetahuan yang diperolehnya, bahwa hubungan kolonial ditentukan oleh pertentangan antara kepentingan penjajah dan kepentingan pihak yang dijajah, maka Perhimpunan Indonesia mengerti bahwa cita-cita Indonesia untuk merdeka tidak mungkin dapat tercapai dengan politik kerjasama. Karena, demikian tulis Indonesia

Merdeka: “Kerjasama hanya mungkin antara dua golongan yang mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama dan kepentingan bersama. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kerjasama hanya berarti pihak yang kuat mempermainkan pihak yang lemah, mempergunakannya untuk kepentingan sendiri.

Dan, apabila gerakan nonkooperasi di Indonesia pada mulanya merupakan tiruan daripada Gerakan Gandhi, maka Perhimpunan Indonesia memproklamasikannya semata-mata sebagai ‘segi negatif daripada politik self help yang aktif. Baik negatif maupun positif itu tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi yang menjadi dominan adalah segi positif, bukan segi negatifnya. Prinsip ini sudah terungkap dalam program asas Pengurus Perhimpunan Indonesia tahun 1923. Maka salah sangka orang untuk mengatakan, bahwa nonkooperasi kami disebabkan oleh karena bangsa Indonesia sudah kehilangan kepercayaan! Sebaliknya, “ia adalah ungkapan-ungkapan bangsa yang percaya akan dirinya sendiri, yang sadar akan munculnya tenaga segar dan muda dan dalamnya.” Adalah politik oto-aktivitet dan bukan politik mengemis yang dianjurkan oleh Perhimpunan Indonesia dengan segala kekuatan aksinya, dan ini kemudian juga menggema pada aksi-aksi partai-partai nasionalis Indonesia di Tanah Air.

Menurut wawancara daripada pemimpin Sarekat Islam Haji Agus Salim kepada surat kabar “De Locomotief”, Sarekat Islam menganggap “non-cooperation” (nonkooperasi) sebagai “self help” (membantu diri sendiri), karena Sarekat Islam yakin bahwa “masyarakat kolonial hanya memberi sedikit tempat bagi sentimentalitet dan perikemanusiaan, tetapi diperintah berdasarkan angka-angka dan kenyataan-kenyataan.” Dan, politik kerjasama yang tidak ada manfaatnya telah kami terangkan dalam karangan “Het Indische Imitatie-Parlement” (Parlemen Tiruan Hindia Belanda) dalam “Indonesia Merdeka” tahun 1924, No.2 sebagai berikut: “Selama kepada bangsa kita tidak diberikan hak pemilihan umum yang menjamin pengaruhnya atas badan perwakilan, dan selama badan perwakilan itu tidak diberikan sifat yang sungguh-sungguh daripada suatu perwakilan, maka semua pekerjaan untuk itu

tidaklah bermanfaat dan hanyalah berarti menghambur-hamburkan waktu daripada bangsa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Seorang pujangga yang jujur seperti Romain Rolland dapat juga menulis pada waktu ini sebagai berikut: “Setengah abad yang lalu, Kekuasaan mendahului hukum. Kini keadaan lebih parah lagi: Kekuasaan adalah Hukum. Yang pertama telah menelan yang kemudian.” Disinilah penjelasan, mengapa bangsa-bangsa Indonesia, setidak-tidaknya wakil-wakilnya, pada prinsipnya dapat turut serta dengan suatu “dewan perwakilan” seperti Dewan Rakyat. Mempersamakan Dewan Rakyat dengan parlemen dalam suatu negara merdeka seperti Nederland, adalah tidak benar. Bangsa Indonesia mempunyai istilah yang lebih tepat untuk perwakilan semacam itu, yang disebut “Dewan Rakyat”. Sebutannya sederhana saja, hanya dengan mengganti huruf yang terakhir menjadi “Dewan Rayap”, jadi merupakan dewan perusak.

Perhimpunan Indonesia dewasa ini lebih mengerti daripada di masa lalu, bahwa masalah kemerdekaan nasional adalah masalah kekuasaan. Perubahan dalam hubungan kolonial hanya dapat dilakukan dengan mengajukan persoalan kekuasaan. Untuk sampai ke situ maka pertama-tama perlu adanya massa aksi, jadi membentuk kekuatan yang berturut-turut harus dicapai dengan propaganda untuk kesatuan Indonesia, solidaritas Indonesia, untuk kepercayaan dan kesadaran diri pribadi.

Pikiran dasar ini untuk pertama kali terungkap dalam dua dalil pertama dan Deklarasi Prinsip daripada kepengurusan Perhimpunan Indonesia tahun 1924.

“Hanya suatu Indonesia yang bersatu, yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan antara kelompok, dapat mematahkan kekuasaan kaum penjajah. Tujuan bersama-yakni membebaskan Indonesia-menuntut terwujudnya massa aksi kebangsaan yang sadar akan diri sendiri dan tegak atas kekuatan sendiri.”

“Indonesia Merdeka” mencatat tentang itu: “Terhadap organisasi harus kita hadapkan organisasi, terhadap kekuasaan, kekuatan kita. Orang-orang Indonesia yang lulus dari sekolah tinggi harus bergabung pada massa yang berjuang. Sudah ter/alu lama kaum intelek menjauhkan diri dan massa rakyat, dan makin keras terdengar

cercaan dan Tanah Air bahwa kebanyakan dan para sarjana yang pulang tidak memperdulikan nasib massa yang menderita.”

Dengan mengemukakan dalil agar kaum intelek bergabung dengan massa, maka Perhimpunan Indonesia lebih mengerti akan misinya daripada perkumpulan Budi Oetomo, yang pertama-tama bermaksud untuk menjadi suatu perkumpulan intelek asal Jawa semata. Karena tanpa massa itu, suatu gerakan kemerdekaan tidak dapat berbuat apa-apa dan dalam massa itu tersembunyi kekuatan rakyat yang sebenarnya. Maka, tulis “Indonesia Merdeka”:

“Faktor yang menentukan dalam perjuangan kemerdekaan nasional bukanlah terletak pada kelompok kecil kaum intelek. Jantung bangsa berdenyut dalam lapisan-lapisan luas. Intelek hanya perlu menemukan kekuatan rakyat yang meluap-luap segar itu dan menjadikannya bahasanya. Jantung itu terbuka untuk menangkap suara zaman.”

Berkat prinsip-prinsipnya yang dirumuskan dengan cermat sekali, maka Perhimpunan Indonesia menikmati kepercayaan rakyat; banyak yang telah diusahakannya untuk menghilangkan kejengkelan massa terhadap kaum intelek, sedangkan rakyat itu belum lama berselang beranggapan bahwa kaum intelek hanya memikirkan kesenangan diri saja dan mengejar kepentingan kelasnya saja. Kepercayaan massa rakyat itu sangat besar artinya bagi Perhimpunan Indonesia. Karena hanya dengan itu, ia cukup kuat secara moral untuk memberi pimpinan kepada massa agar mencapai kehendak rakyat yang tersusun itu.

Tuan Ketua! Sampailah saya sekarang pada soal aksi Perhimpunan Indonesia. Setelah saya menguraikan prinsip-prinsipnya, maka menjadi jelas kini bahwa dalam usaha mempersiapkan diri untuk kemerdekaan Indonesia, Perhimpunan Indonesia menjalankan politik yang langsung menuju sasaran. Ia tak mau mengambil jalan-jalan samping lagi, yang hanya menuju pada lebih banyak kegetiran.

Selamat tinggal politik memohon dan mengemis!

Selamat tinggal politik memohon restu!

Selamat tinggal politik menadahkan tangan!

Perhimpunan Indonesia sadar sepenuhnya bahwa aksi yang berdasarkan prinsip non-kooperasi akan mampu memulihkan pada bangsa Indonesia suatu kepercayaan padadiri sendiri dan merangsang kesadaran politiknya. Sejak diperolehnya kemerdekaan nasional yang pada garis besarnya merupakan persoalan kekuasaan dan kekuatan, karena gerakan kebangsaan nasional menghadapi posisi kuat si penjajah, maka yang pertama-tama harus diketahui adalah, mengapa kedudukan itu kuat dan apa unsur-unsurnya. Maka tugas Perhimpunan Indonesia yang pertama-tama adalah menyelidiki kedudukan yang kuat itu. Ditemukannya bahwa posisi kuat itu terdiri atas dua faktor. Disamping kekuatan yang nyata dari perlengkapan senjata orang kulit putih dan tentara yang siap sedia, yang tidak dapat diserang begitu saja, ada pula faktor kekuatan psikologis, yang di atasnya berdiri Pemerintah dan gengsi penguasa. Faktor kekuasaan inilah yang satu persatu dan secara sistematis harus diruntuhkan. Faktor-faktor itu terutama sekali terdiri dari:

1. Politik memecah-belah dan menguasai
2. Membiarkan massa menjadi dungu
3. Injeksi psikologis berupa gagasan tentang keunggulan bangsa kulit putih dan kedudukannya yang tak tergoyahkan; injeksi gagasan tentang ketidakmampuan bangsa Indonesia sebagai nasion.

***Melawan Politik Divide et Impera**

Perhimpunan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa gerakan kebangsaan dapat mencapai banyak hal apabila faktor-faktor kekuasaan psikologis itu, yang merupakan tumpuan gengsi si penjajah, dapat diruntuhkan. Melawan Politik Memecah-Belah (*divide et impera*) adalah tugas utama Perhimpunan Indonesia untuk menghadapi politik divide et impera penguasa dengan menjalankan propaganda keras tentang persatuan dan solidaritas Indonesia. Sebagian besar karangan-karangan dalam “Indonesia Merdeka” edisi Holland (Belanda), dan sekurang-kurangnya 70 persen dan- pada tinjauan dalam edisi Indonesianya, membahas masalah itu.

Dalam “Indonesia Merdeka” No.3 tahun 1925, Perhimpunan Indonesia menyampaikan seruan yang khusus ditujukan kepada gerakan pemuda di Tanah Air.

Karena angkatan muda di Indonesia sudah terlalu banyak menderita dan kuman perusak yang memecah-belah dan menguasai bangsa. Namun dapat pula dimengerti, mengapa benih kesukuan dan antagonisme dipupuk dengan sangat cermat, terutama sekali pada angkatan muda Indonesia yang begitu terbuka sifatnya. Oleh karena anak muda kini adalah rakyat esok; dan apa yang dipikirkan oleh angkatan muda kini, adalah pemikiran bangsa kelak. Bahaya ini menjadi lebih besar lagi buat Indonesia, karena sebagian besar daripada bakal pemimpin-pemimpinnya dikerahkan dan angkatan muda yang dewasa ini masih duduk di bangku sekolah.

Bahwa propaganda Perhimpunan Indonesia yang tenang-tenteram ini ditakuti oleh penguasa, setidak-tidaknya tak disenanginya, terbukti dan kenyataan bahwa majalah Indonesia Merdeka disita di kantor-kantor pos di Indonesia mulai Nomor 3 Tahun 1925. Di sini ternyata lagi, sampai di mana kesewenang-wenangan Pemerintah dapat meluas di Indonesia. Undang-undang menjamin, bahwa barang yang dicetak di Negeri Belanda dapat masuk dengan leluasa ke Indonesia, pemasukan barang-barang yang dicetak di negeri Lain dapat ditolak oleh Gubernur Jenderal, tapi nama barang cetakan itu dan alamatnya harus disebut dan diumumkan dalam berita resmi.

Dan, kini majalah Perhimpunan Indonesia ditahan dan disita di Kantor Pos dengan alasan yang dicari-cari, yang dikatakannya bahwa “Indonesia Merdeka” itu memang boleh masuk ke Indonesia, sudah masuk dan telah melalui batas wilayah bea cukai! Tentang tindakan ini “Indonesia Merdeka” menulis sebagai berikut: “Mana abdi-abdi Belanda yang katanya bertugas menjaga agar undang-undang itu dipatuhi? Apakah undang-undang itu hanya dipertahankan sepanjang ia menguntungkan si penguasa kulit putih dan akan menjadi kertas bekas tak terpakai, apabila kepentingan si kulit putih menjadi terdesak karenanya?”

Namun, walaupun “Indonesia Merdeka” disita, gagasan Persatuan Indonesia merembes terus dan mencapai berbagai lapisan penduduk. Tiada terdengar tumbuhnya padi! Masyarakat memang sudah penuh dengan Gagasan Baru!

Tentang propaganda persatuan dan solidaritas ini “Indonesia Merdeka” menulis:

“Adalah tugas putera-putera cendekia dan rakyat yang dzperbudak, untuk memindahkan pohon solidaribs yang berharga itu ke bumi Indonesia yang subur dan memeliharanya dengan kasih-sayang agar kelak menjadi senjata untuk memerdekakan Indonesia.”

Banyak anggota Perhimpunan Indonesia yang telah pulang ke Tanah Air bekerja mempropagandakan semangat Persatuan Indonesia dan rasa senasib sepenanggungan. Telah tercapai suatu bentuk konsolidasi, baik di antara partai-partai politik Indonesia, maupun di kalangan gerakan pemuda. Pada tanggal 21-22 Agustus 1926 telah terbentuk di Bandung suatu “Komite Persatuan” nasional yang dipimpin bekas Sekretaris Perhimpunan Indonesia, empat belas partai politik besar dan kecil telah tergabung di bawah panji “Komite Persatuan” tersebut. Dengan demikian terbinalah dasar untuk membentuk suatu “Nationale Concentratie” (konsentrasi Nasional) yang selalu menjadi idam-idaman Perhimpunan Indonesia. Sementara itu telah terbentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menyebar-luaskan lebih jauh pokok-pokok Persatuan Indonesia.

Juga, dalam kalangan pemuda di Indonesia telah tumbuh semangat persatuan, gagasan Indonesia Raya. Kira-kira pada pertengahan tahun 1927 terbentuk organisasi angkatan muda, Indonesia Muda (IM). Tujuannya seperti yang dicantumkan pada pasal-pasal rencana Anggaran Dasarnya, adalah: “Menyebarluaskan dan memperkuat pada orang-orang Indonesia gagasan Persatuan Indonesia yang nasional.” Semua yang tidak puas dengan organisasi-Organisasi pemuda yang ada, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond dan berbagai organisasi lain yang belum dapat melepaskan diri dan aspek kepulauan atau kesukuannya, telah bergabung pada organisasi baru itu. Sehubungan dengan terbentuknya Indonesia Muda maka “Indonesia Muda” menulis: “Kami menyambut dengan gembira lahirnya Indonesia Muda! ia cocok dengan semangat Perhimpunan Indonesia. Kita harus mengamatinya dengan kasih sayang dan dengan tekun menjaga pertumbuhannya sebagai kuncup baru pada barang yang tua.” Dalam “Surat Terbuka kami yang ditujukan kepada perkumpulan-perkumpulan pemuda di Indonesia” yang sayangnya tidak pernah sampai pada alamatnya karena

sensor kolonial, telah kami tunjukkan urgensinya untuk “bersatu “. Dengan rasa puas dapat kami lihat, bahwa benih yang kami sebar telah mendapat akar-akar yang kokoh.”

Indonesia Muda harus melakukan peranan yang penting. Bukan saja ia harus mewujudkan gagasan persatuan kaum muda, tetapi ia juga harus berusaha agar angkatan baru, dalam perjuangannya untuk kemerdekaan, merombak segala-galanya, agar dapat membangun suatu kehidupan nasional yang baru, yang disesuaikan dengan syarat-syarat peradaban yang mutakhir.

Tuan Ketua! Saya sebut semua ini karena saya membicarakan aksi Perhimpunan Indonesia. Sebagai orang yang jujur berjuang untuk cita-citanya, saya tidak mau menyembunyikan apa-apa terhadap Tuan. Ada baiknya untuk disadari, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh perkumpulan “anak-anak bengal” itu! Saya lukiskan kepada Tuan dengan jelas, dan sepanjang kemampuan saya, tentang luasnya daerah yang terjangkau oleh jari-jari Perhimpunan Indonesia dalam baktinya kepada gagasan persatuan Indonesia.

Pemikiran tentang persatuan Indonesia merupakan unsur yang penting dalam sistem aksi Perhimpunan Indonesia, oleh karena segala-galanya bergantung kepadanya. Maka pasal 3 Anggaran Dasar berbunyi sebagai berikut: “Perhimpunan Indonesia berusaha untuk mengejar cita-citanya yang khusus dengan memperkokoh gagasan Persatuan Indonesia!”

Berkat propaganda yang intensif maka Perhimpunan Indonesia telah dapat mencapai tujuan bahwa juga di Indonesia sendiri prinsip-prinsip persatuannya makin lama makin disetujui oleh orang banyak. Dengan demikian maka ideal satu Tanah Air yang merdeka memperoleh bentuk yang lebih kokoh. Pada panji setiap partai politik nasionalis di Indonesia tercantum semboyan: Indonesia satu dan tidak terpecah-belah: Indonesia di atas segala-galanya. Ya, juga Budi Oetomo yang berciri Jawa itu telah menjadikan semboyan ini sebagai semboyannya pula, suatu tanda yang sangat berarti bagi jaman ini!

Maka bukanlah suatu kebetulan bahwa justru pada saat akhir-akhir ini masalah persatuan Indonesia dimana-mana sibuk diperbincangkan, terutama sekali di kalangan penguasa. Mereka dengan angkuhnya menolak gagasan tersebut dan dengan pongahnya mereka ingin memberitahukan kepada dunia bahwa tidak ada bangsa Indonesia, bahwa bangsa itu tidak mungkin ada! Sampai MrTreub dalam brosuranya “Masa Depan Hindia-Belanda” merasa dirinya terpanggil untuk menjadi juru bahasa pemikiran, bahwa Hindia-Belanda terdiri dari suatu kumpulan suku-suku bangsa yang termasuk berbagai ras yang berbeda, menganut agama yang berlainan dan adat-istiadat yang bermacam-macam, yang satu sama lain tidak mempunyai ikatan selain kenyataan bahwa mereka semua tunduk kepada pemerintah Belanda.

Pernyataan tegas ini juga disangkal oleh beberapa orang guru mahaguru Leiden (C. Van Vollenhaven, AW Nieuwenhuys, C. SnouckHurgronje, Ph. S. Van Ronkel, HFColenbrander, GAJHazeu, danNJ Krom) dalam karangan bersama mereka yang dimuat dalam majalah “De Gids” dengan judul: “Leiden Diserang”, di mana antara lain dimuat kalimat berikut:

“Kami tidak mau meramalkan hal pertumbuhan kebangsaan yang akan muncul di Hindia-Belanda, tetapi kami atas dasar yang tegas, menolak untuk mengatakan bahwa penduduk pribumi di Hindia-Belanda terdiri dari berbagai ras yang “tidak punya ikatan lain, se/apa tempat permukiman mereka berada di bawah pemerintah Belanda” dan sebaliknya kami mengkonstatir kenyataan, bahwa penduduk itu untuk bagian terbesar termasuk pada satu ras, yakni ras Indonesia yang di masa lampau maupun kini mengenal ikatan antara mereka yang makin menjadi erat dalam bentuk dan artinya.”

Propaganda persatuan Indonesia yang disebarluaskan oleh Perhimpunan Indonesia telah menerobos ke Indonesia. Orang-orang Indonesia dewasa ini tidak membiarkan dirinya ditipu oleh semboyan-semboyan yang palsu dan dusta yang begitu sering dikumandangkan oleh pihak penguasa. Kata-kata Ketua Indonesia Muda Cabang Jakarta mempunyai jangkauan yang luas: “Tugas kita bukanlah mengumpulkan kaum tua yang sudah berkarat dalam pengertian dan keyakinan

mereka. Pekerjaan kita hanyalah meliputi kaum muda saja, sebab masa depan Indonesia ada di tangan mereka.”

Kata-kata ini berbicara banyak. Angkatan Muda, rakyat masa depan, ingin dengan sadar mengembangkan gagasan dan semangat Persatuan Indonesia.

Dapatkah bangkit satu bangsa Indonesia dan penduduk “Hindia-Belanda” dengan begitu banyak perbedaan dalam bahasa, sifat-sifat dan ciri-ciri suku bangsa, serta adat-istiadatnya? Bertanya mereka yang berhati kecut. Sejarah telah banyak memberikan contoh yang membuktikan bahwa ketunggalan bangsa tidak ditetapkan oleh apakah ia seketurunan, seagama, satu kepercayaan, atau satu bahasa, tetapi karena ia percaya bahwa ia bisa bersatu atau, seperti dikatakan oleh Prof Kranenburg: “Dalam kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang teratur, tersusun dan terikat.” Renan berkata: “Suatu bangsa adalah suatu jiwa, suatu prinsip spiritual.” Keyakinan bahwa mereka pernah dan akan selalu bersama, karena memikul nasib sama selama beratus-ratus tahun, berkat letak geografis Indonesia di tengah-tengah lalu-lintas internasional, keyakinan itu sudah mendarah-daging pada orang-orang Indonesia untuk mempersiapkan munculnya kembali bangsa Indonesia. Apabila pikiran persatuan Indonesia sudah menjadi milik semua orang, maka lahirlah nasion Indonesia itu. Dan, adalah tugas Perhimpunan Indonesia mempercepat proses itu.

Tak perlu diterangkan bahwa perjuangan yang hakiki, yakni memerangi usaha membiarkan massa dungu harus dilakukan di Indonesia sendiri. Itu adalah tugas pergerakan nasional di Tanah Air. Apa yang dapat diusahakan oleh Perhimpunan Indonesia, adalah menyebarluaskan prinsip-prinsip yang dapat membebaskan rakyat banyak dan tirani mental politik-kolonial Belanda, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pertama-tama ia telah menunjuk pada mutlaknya kebutuhan akan adanya pendidikan massa, baik untuk angkatan muda maupun untuk kaum dewasa. Tentang itu, “Indonesia Merdeka” menulis:

“Rakyat kita diperlakukan dan dibiarkan dungu. Terserah pada kita untuk merubah keadaan itu dan memperbaikinya. Sekolah-sekolah untuk rakyat yang pertama-tama

harus kita selenggarakan; di tempat-tempat itu pemuda-pemuda Indonesia di bawah bimbingan orang yang ahli berkumpul hampir setiap hari

Pendidikan terutama sekali harus menyadarkan pemuda bahwa tujuan hidupnya adalah kemerdekaan Tanah Air Dengan cara demikian kita memupuk warganegara yang cakap, yang siap berjuang untuk hadiah yang tertinggi bagi Tanah Air kita.”Maka Perhimpunan Indonesia selalu sibuk mencari jawaban atas masalah bagaimana membebaskan massa rakyat Indonesia dan tekanan batin oleh penguasa? Rupanya prinsip non-kooperasinya mempunyai pengaruh yang positif dan segar. Dengan menyadarkan rakyat lewat prinsip ini maka massa mulai sadar akan hak-hak politiknya, dan keinginannya untuk berusaha sendiri dengan kekuatan sendiri ditingkatkan. Maka demikianlah tulis “Indonesia Merdeka”:

“Kini terserah pada angkatan muda kita untuk menyadarkan rakyat daripada semangat kemerdekaan yang berkobar di hail kita, untuk menunjukkan kepada dun ia luar bahwa cita-cita kemerdekaan kita tumbuh terus, kendati ia ditindas dan diperkosa.” Maka bagi Perhimpunan Indonesia pendidikan buat rakyat banyak bukan hanya berarti memberantas buta huruf. Benar terbayang cara yang efektif dan Amerika yang memajukan pendidikan rakyat di Nupina, tatkala negeri itu menjadi jajahannya. Tentara, pejabat, kaum pensiunan, ya hampir semua orang yang tahu membaca dan menulis, dikirim ke daerah untuk mengajarkan rakyat membaca dan menulis. Benar, bahwa itu adalah suatu cara, tetapi itu saja belum memadai. Demikian pula, cara itu akan menelan berjuta-juta rupiah di Indonesia kalau diselenggarakan secara besar-besaran.

Uang sebanyak itu tidak dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pengajaran dan pendidikan bagi rakyat begitu sedikit diperhatikan oleh pemerintah Hindia-Belanda sehingga cita-cita kemerdekaan Indonesia lama tidak akan terwujud. Tidak, Tuan Ketua, Indonesia tidak akan menunggu sampai petani terakhir yang, di desa yang paling akhir akan bisa menulis untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya! Pendidikan massa yang dianjurkan oleh Perhimpunan Indonesia bermaksud untuk membentuk watak massa. Karena kapasitas rakyat tidaklah pertama-tama ditentukan

oleh jumlah yang melek huruf, melainkan oleh watak rakyat itu sendiri. Karena itulah Perhimpunan Indonesia berusaha keras meningkatkan taraf kecerdasan penduduknya, dalam arti seluas-luasnya.

Haruslah ia menyebarkan pemikiran, bahwa rakyat Indonesia diberi pemandangan yang luas dengan pendidikan massa yang populer, dengan mengajarkan sejarah, politik, dan lain-lain, sesuai dengan yang dilakukan di Denmark pada “Sekolah-sekolah Tinggi Rakyat” yang dirintis oleh ahli ilmu pendidikan terkenal, Grundtvig. ini bukanlah suatu pendangkalan daripada ilmu pengetahuan, tetapi sekolah tinggi rakyat adalah suatu usaha untuk memberi pengertian kepada jiwa-jiwa sederhana agar memahami gerakan-gerakan besar rohaniah dan spiritual dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia, dahulu dan sekarang, dalam perjuangannya untuk memenangkan cita-cita yang mulia itu, yakni keadilan dan kebenaran. “Sekolah Tinggi Rakyat tidak mau memupuk budak-budak, tidak mau mengenakan seragam pada jiwa-jiwa, ia ingin mendidik orang-orang agar menjadi anggota masyarakat yang bersikap dewasa.”

“Indonesia Merdeka” juga berpikir ke jurusan itu!“Kami tahu, betapa sukarnya untuk membuat garis yang jelas, melalui mana rakyat banyak dibimbing menuju sasaran bersama dengan kepastian yang mantap. Sukar, apalagi pada masa ini karena kesadaran nasional masih harus dikonsolidasi, dimantapkan. Disini pengajaran seperti yang di sekolah, harus ada pendidikan umum untuk massa dan dengan demikian kita memperoleh suatu keharmonisan yang utuh. Lebih tegas lagi, disamping pengajaran untuk anak-anak muda harus dimajukan pula pendidikan untuk rakyat banyak. Namun janganlah salah tangkap: yang menjadi tujuan bukanlah semata-mata agar yang terdidik dapat membaca dan menulis! Dengan pendidikan massa yang murni dimaksud: membuat rakyat mengerti, betapa besarnya nilai badan yang sehat dan jiwa yang sejahtera. Kesehatan fisik, menuju kesehatan rakyat yang lebih baik, yang membuatnya lebih cocok untuk melakukan perjuangan hidup. Badan yang sehat perlu untuk merombak kemauan belaka menjadi tindakan, rakyat yang sehat lebih kuat bertahan menghadapi pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan baginya

Yang kedua, keadaan psikis yang baik, memperkuat dan meningkatkan kadar rakyat kita yang baik. Seperti yang sudah saya katakan, maka dalam pandangan Perhimpunan Indonesia, salah satu unsur yang penting dalam perjuangan melawan usaha membiarkan rakyat dungu terus adalah memberi pendidikan politik kepada massa, tegasnya, menyadarkan massa akan hak-hak politiknya. Untuk itu maka prinsip non-kooperasi tepat sekali, karena dengan itu massa rakyat belajar mengenal diri sendiri, percaya atas tenaga sendiri.

***Memerangi Injeksi Psikologis bahwa Kulit Putih Lebih Unggul**

Tuan Ketua! Sampailah saya pada faktor kekuatan psikologis yang ketiga, yang mendasari kekuasaan penjajah, yakni injeksi psikologis, tentang keunggulan bangsa kulit putih itu yang tak dapat diganggugat kedudukannya, yang berdampingan dengan sugesti akan ketidakmampuan bangsa Indonesia.

Bertahun-tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pesona kolonial itu, sampai-sampai percaya pada kelumpuhannya dan betapa perlunya ada penjajah untuk membimbingnya. Sistem kolonial Belanda yang bertolak dari pendirian bahwa Indonesia harus terus-menerus merupakan embel-embel daripada “Firma Nederland” tidaklah cocok untuk memupuk gairah kemerdekaan pada warga jajahannya yang bumiputera itu. Dari hari ke hari diperingatkan kepada kaum bumiputera bahwa mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk memimpin, mereka tidak cakap untuk mengambil inisiatif, sehingga mereka ditakdirkan untuk sejak dan kecilnya bekerja di bawah pimpinan bangsa Eropa. Injeksi ini melemahkan urat saraf orang-orang Indonesia yang lemah wataknya. Dan keragu-raguan orang-orang Indonesia akan kemampuan sendiri oleh penjajah dipupuk terus-menerus dengan cara apa saja.

Sugesti mengenai kelumpuhan nasional orang-orang Indonesia dan injeksi gagasan keunggulan bangsa kulit putih itu diperlukan penjajah untuk mempertahankan posisi kuatnya. Berkat sugesti yang bertahun-tahun itu maka penduduk bangsa Indonesia benar-benar meragukan kesanggupannya. Maka kira-kira tiga tahun yang lalu “Indonesia Merdeka” menulis sebagai berikut: “Belum lama berselang Indonesia masih berada pada haribaan kepercayaan dan tawakal. Ia

percaya bahwa semuanya akan beres, namun jika kepercayaannya itu meleset seperti yang dicemaskannya, maka tawakallah yang akan menghibur hatinya dan memberikan keberanian untuk terus hidup.”

Perhimpunan Indonesia mengerti betul bahwa rasa rendah diri pada massa rakyat merupakan suatu rintangan besar untuk mencapai cita-citanya. Maka Perhimpunan Indonesia merasa berkewajiban untuk pertama-tama memompakan pada massa rakyat kepercayaan akan diri pribadi dan harga diri. Bangsa Indonesia harus dibangun dan biusnya sikap penurut. Dan prinsip non-koperasinya bekerja menegakkan dan menyelesaikan. Tulis “Indonesia Merdeka” ketika menyerang posisi si penjajah sampai ke akar-akarnya: “Tidak mau bekerjasama adalah metode perjuangan yang jauh lebih baik daripada metode apapun. Pekerjaan pertama dalam perjuangan kita adalah merintis jalan dan menghilangkan rintangan-rintangan. Si Belanda sudah terlalu lama menikmati respek dan hormat kita yang berlebih-lebihan. Tugas kita sekarang adalah jelas dan tegas. Kita menyerukan agar reputasi Belanda itu dirobohkan karena terlalu berlebih-lebihan. Baru kalau hal itu terwujud dapatlah kita beralih pada tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi.

Dengan tiada memperdulikan apa yang dibuat oleh Belanda, maka kita memberikan kepada rakyat kepercayaan akan diri sendiri dan kita buktikan kepada massa bahwa orang kulit putih di Indonesia tidak mutlak perlu. Alangkah hebatnya sumber energi yang kita gali dengan propaganda kita itu.” Dalam usahanya membangkitkan respek atas diri sendiri dan kesadaran akan harga diri kepada massa rakyat, Perhimpunan Indonesia dibantu oleh keadaan di Indonesia sendiri. Adanya korupsi di kalangan atas dan kalangan bawah yang bercabang luas antara pegawai-pegawai pemerintah berkulit putih dan yang berkembang subur semua itu adalah faktor-faktor yang tak dapat dinilai rendah untuk memerosotkan gengsi si kulit putih di Indonesia.

Namun Perhimpunan Indonesia juga mengerti bahwa “self respect” dan kesadaran akan harga diri saja tidak cukup untuk mencapai cita-citanya. Rakyat harus belajar membantu diri-sendiri dalam perjuangan hidup. Rakyat harus melepaskan diri

dan perasaan bergantung pada bangsa kulit putih, lepas dan perasaan, bahwa hanya yang berkuasa saja yang dapat memperbaiki kedudukan ekonomi dan sosialnya. Rakyat harus yakin bahwa politik kolonial tidak sanggup melaksanakan hal itu. Dengan meluaskan prinsip non-kooperasinya ke arah yang positif, sampailah Perhimpunan Indonesia di bidang self help atau berdiri di atas kaki sendiri. Rakyat di bawah pimpinan sendiri harus mengambil inisiatif untuk memajukan kesejahteraannya sendiri. Jadi tugas berat daripada pemimpin-pemimpin Indonesia—hal ini disadari benar oleh Perhimpunan Indonesia—adalah untuk merangsang kemauan bertindak sesama bangsa, membimbing mereka dalam mengembangkan tenaga sendiri dengan memakai hasil ilmu dan teknologi terbaru.

Tuan Ketua! Nampak ada perbedaan besar antara sistem non-kooperasi Mahatma Gandhi dan Perhimpunan Indonesia. Gandhi ingin kembali kepada tradisi-tradisi nasional. Di atas segalanya, untuk memboikot apa saja buatan Inggris, ia mengajak rakyat India untuk mempergunakan alat-alat produksi primitif yang kuno seperti alat tenun kuno. Ia menentang bekerjanya hukum-hukum ekonomi, dan karena itu maka sistemnya mengalami kebangkrutan, kegagalan.

Jika sistem Gandhi dalam menjalankan non-cooperation gagal, janganlah mengharapkan bahwa juga non-kooperasi Perhimpunan Indonesia akan mengalami nasib yang sama. Karena titik beratnya tidak pada segi negatif, melainkan pada segi positifnya. Sistem non-kooperasi Perhimpunan Indonesia disesuaikan dengan syarat-syarat masyarakat modem. Sistemnya merupakan motor yang akan menggerakkan tenaga-tenaga tersembunyi, yang terdapat dalam kandungan masyarakat. Sistem bekerja untuk dirisendiri itu, didasarkan pada sifat-sifat yang ada dalam diri rakyat, yang sejak zaman purbakala merupakan ciri-ciri penting daripada masyarakat Indonesia. Sifat-sifat itu adalah rasa senasibsepenanggungan dan gotong royong! Sifat-sifat ini memberikan dasar yang kokoh untuk organisasi koperasi-koperasi yang memang tepat sekali bagi bangsa yang hidup bertani, seperti halnya bangsa Indonesia yang sangat terdesak oleh tekanan modal asing yang sangat kuat. Bagi Perhimpunan Indonesia, mengorganisasi serikat-serikat tani dalam semangat ini, adalah suatu syarat

mutlak untuk menyalurkan tenaga-tenaga tersembunyi dan rakyat Indonesia dan mengembangkan kesadaran rakyat akan harga dirinya.

Dua tahun yang lalu telah saya tulis dalam karangan saya: Perkumpulan-perkumpulankoperasi sangat penting untuk pembangunan ekonomi nasional. Hanya suatu kehidupan ekonomis yang tersusun secara kooperatiflah yang dapat dengan sukses menghadapi penghisapanoleh modal besar yang dilindungi oleh pemerintah asing, seperti yang tampak di Indonesia dewasa ini, yang hanya membawa kesengsaraan dan kemiskinan bagi rakyat. Dewasa ini koperasi adalah satu-satunya bentuk organisasi ekonomi yang punya harapan membina dasar-dasar yang kokoh untuk membangun kembali ekonomi kita. Suatu contoh yang tepat telah diberikan oleh Denmark yang dengan tepat dinamakan “Persemakmuran Kooperatif”. Berkat organisasi-organisasi koperasi itu maka rakyat Denmark telah berhasil bangkit dan keadaan hina-papa dan menjadi salah satu di antara bangsa-bangsa yang paling makmur di dunia. Dalam perjuangan kita untuk merebut kembali kemerdekaan nasional kita, maka perjuangan di bidang ekonomi tidak boleh tertinggal. Perjuangan politik maupun perjuangan ekonomi adalah faktor-faktor yang amat penting untuk mencapai cita-cita kita.”

***Perjuangan Menentang Politik Asosiasi.**

Sang penguasa rupanya sadar, bahwa cepat atau lambat, perasaan diri dan gairah merdeka akan muncul pada bangsa yang dijajah. Maka sebelum perasaan-perasaan itu muncul, ingin disalurkan pada alur yang dikehendaki oleh Nederland. Hal itu hendak dicapainya melalui politik asosiasi. Maka dicetuskan gagasan tentang suatu persekutuan kenegaraan antara Indonesia dan Nederland “atas dasar sama hak, sama kewajiban.” Gagasan itu mencoba merayu bangsa Indonesia, setidaknya pada lapisan intelektualnya, bahwa Nederland dan Indonesia tidak punya pertentangan kepentingan, sebaliknya mempunyai kepentingan bersama. Menurut logika ini, Indonesia dan Nederland harus kekal di bawah satu ikatan Kenegaraan. Namun pimpinannya ada di Nederland. Tak perlu diterangkan bahwa seorang nasionalis Indonesia sejati akan menolak gagasan ikatan yang tak wajar itu. Karena

hal itu berarti melepaskan cita-cita kemerdekaan bagi Tanah Tumpah Darah Indonesia dan menerima suatu sistem dimana Indonesia tetap merupakan embel-embel dan “Firma Nederland”. Tapi karena sejak bertahun-tahun lamanya telah diberikan kepada rakyat Indonesia suatu sugesti tentang rendah-dirinya dan tentang sifat-sifat keunggulan daripada Barat; maka pada mulanya banyak kaum intelektual Indonesia terjebak oleh sugesti itu.

Dengan demikian adalah tugas Perhimpunan Indonesia untuk memperingatkan teman-teman setanah air terhadap bahaya berkedok halus ini. Maka dikatakan oleh “Indonesia Merdeka”: “Bagi kita, kaum nasionalis, setiap usaha yang mengarahkan pandangan pada persaudaraan bangsa dan ras berarti melemahkan tenaga, mendinginkan gelora untuk kehormatan dan martabat bangsa. Tujuan menjadi kabur; sumber keberanian dan ketekadan justru terletak pada sasaran yang dibatasi dengan tajam. Satu-satunya semboyan pada saat ini yang dapat menjiwai perjuangan kita adalah kemerdekaan nasional. Kemerdekaan adalah sesuatu yang nil untuk massa, yang dapat dihayatinya; dan hanya dan situ dapat mengalir satu aksi yang terus-menerus untuk memperjuangkan kondisi hidup yang lebih baik.”

Jelas, bahwa politik asosiasi itu hendak menyembunyikan unsur penting dalam sistem kolonial, seperti pertentangan kepentingan dan pertentangan ras; dengan demikian maka kekuatan gerakan kebangsaan menjadi lemah. Karena justru pertentangan kepentingan dan pertentangan ras itulah yang merangsang dan membangkitkan hasrat untuk mencapai kemerdekaan dengan segera.

“Indonesia Merdeka” memberikan tanggapannya atas usaha menyembunyikan pertentangan kolonial itu sebagai berikut: Mempertajam pertentangan, menentukan dengan tegas batas antara kulit putih dan sawo malang, semua itu bekerja menolak ke luar dan memesrakan kedalam.” Tiada terdengar tumbuhnya padi! Asas-asas Perhimpunan Indonesia yang dipropagandakan dengan gaya yang meyakinkan, telah merembes ke Indonesia dan menyebar. Selanjutnya tulis “Indonesia Merdeka”:

“Suara Indonesia Merdeka adalah salah satu di antara beberapa faktor yang membuka mata dan menerangkan pandangan. Suara itu telah menggema di Indonesia, karena

udara tanah air sudah penuh cita-cita persatuan.” Maka, banggalah Perhimpunan Indonesia, bahwa aksinya telah berjasa untuk mempereratmatinya politik asosiasi secara tragis, sebagai penggantinya lahir politik yang menginginkan Indonesia Merdeka.

Tuan Ketua! Saya menguraikan dengan panjang lebar aksi Perhimpunan Indonesia ini, agar jelas bagi tuan tentang apa yang diinginkannya, dan bagaimana ia mengejar tujuan itu. Saya tidak menyembunyikan bahwa aksinya untuk sebagian besar adalah bertujuan merongrong dan meruntuhkan secara sistematis, sokoguru-sokoguru psikologis, yaitu tempat bertopangnya kekuasaan dan gengsi penjajah. Tak ada orang yang dapat menyesali usaha Perhimpunan Indonesia itu. Karena faktor-faktor itulah yang memecah-belah bangsa Indonesia, membiarkan rakyatnya dungu, memperlakukannya sebagai budak, dan akhirnya menyesatkannya. Meruntuhkan faktor-faktor itu, yang membunuh pertumbuhan dan perkembangan tenaga rakyat, disamping mempropagandakan prinsip-prinsipnya, adalah syarat mutlak Perhimpunan Indonesia untuk sampai pada usaha pendidikan massa dalam arti yang seluas-luasnya.

Sistem Perhimpunan Indonesia bertujuan untuk memupuk kepercayaan rakyat pada dirinya sendiri, pada kesadarannya sendiri, dan juga untuk meyakinkan rakyat itu bahwa bangsa Belanda tidak abadi memerintah di Indonesia. Inilah, Tuan Ketua, inti daripada apa yang saya katakan di tempat lain “membentuk negara dalam negara”. Membentuk nasion Indonesia dengan peralatan sendiri dan kehidupannya sendiri, sekalipun sementara masih di bawah penjajahan asing! Untuk Perhimpunan Indonesia, yang sangat penting bukanlah bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaannya, melainkan bagaimana setelah kemerdekaan itu diperoleh, ia dipertahankan. Setelah kemerdekaan itu diperoleh, maka tidak boleh ada kekacauan, yang hanya akan mengundang penjajahan asing yang baru oleh bangsa asing yang lain. Dalam makna inilah dapat dimengerti aksi Perhimpunan Indonesia, apabila ia bicara tentang pembentukan negara dalam negara.

Tentu saja dapat diajukan pertanyaan tentang bagaimana sikap Perhimpunan Indonesia terhadap posisi yang kuat dan nyata dan yang berkuasa, yang bertopeng atas kekuatan senjata dan tentara yang siap-sedia. Bagi siapapun jelaslah bahwa terhadap kekuatan yang besar itu, massa yang tidak tersusun baik tidak mempunyai daya apapun. Dalam sistem Perhimpunan Indonesia tidak ada tempat bagi politik yang berdasarkan sentimen dan emosi semata. Karena politik yang demikian, yang dibimbing oleh nafsu yang tak terkendalikan untuk menyerang kubu penjajah dengan klewang dan pacul, tak dapat tidak berakhir pada pemusnahan diri-sendiri dan kekalahan total. Terhadap kekuatan yang bersenjata hanya gerakan massa sajalah yang dapat berbuat sesuatu.

Oleh karena itu gerakan kebangsaan di Indonesia pertama-tama harus berusaha supaya ada aksi massa yang organisasinya baik; hanya itu saja yang sanggup mengajukan pertanyaan mengenai kekuatan. Sejarah dunia telah mengajarkan bahwa terhadap suatu gerakan massa yang terorganisir dan rakyat, angkatan bersenjata dan pemerintah terpaksa berpangku tangan. “Bahwa bangunan kolonial pada suatu waktu akan rubuh, bagi kami hal itu sudah pasti. Persoalannya hanyalah waktu, cepat atau lambat, dan bukan ya atau tidak. Pasang yang menaik tidak dapat ditolak; masa depan adalah ibarat laut yang tidak mengenal pasang surut.”

Tuan Hakim Ketua, tuan-tuan Hakim yang mulia!

Saya telah mempersiapkan suatu pidato pembelaan yang panjang untuk mana saya meminta perhatian tuan-tuan selama kira-kira tiga setengah jam. Namun saya tidak meminta waktu tuan-tuan yang berharga, karena pidato pembelaan ini akan saya serahkan kepada tuan-tuan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyokong sepenuhnya apa yang secara gemilang diucapkan oleh penasehat-penasehat hukum saya: Mr. Mobach dan Mr. Duys kemarin.

Hanya satu pasal yang ingin saya terangkan secara singkat kepada tuan-tuan, yakni soal sikap Perhimpunan Indonesia terhadap kekerasan. Baik dalam anggaran dasarnya ataupun dalam pernyataan prinsip-prinsipnya tidak ada unsur kekerasan.

Talc pernah Ia menginginkan suatu tindakan kekerasan. Tetapi Perhimpunan Indonesia memang pernah berbicara tentang kekerasan.

Dalam analisa tentang perimbangan kolonial, maka Perhimpunan Indonesia mengetahui bahwa perimbangan itu ditentukan oleh dua daya yang bekerja dengan berlawanan arah, yakni pendirian Belanda bahwa daerah jajahan harus dipertahankan dengan segala upaya, dan cita-cita Indonesia yang menginginkan kemerdekaan mutlak. Dan ini membawanya pada keyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diperoleh dengan memakai kekerasan. Namun ini bukanlah suatu penemuan yang luar biasa.

Karena juga kaum misionaris dan anggota-anggota Parlemen Belanda telah sampai pada kesimpulan yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh Mr. Duys kemarin dengan mengambil beberapa kutipan. Adalah merupakan hukum sejarah bahwa lahirnya suatu bangsa selalu berdampingan dengan cucuran darah dan air mata.

Indonesia Merdeka menulis tentang ini sebagai berikut (1924): ‘Cepat atau lambat, setiap bangsa yang ditindas akan merebut kembali kemerdekaannya; itu adalah hukum besi daripada sejarah dunia. Hanya kondisi dimana berlangsung gerakan kemerdekaan itu juga ikut ditentukan oleh si/cap mereka yang mempunyai kekuasaan di tangannya. Tergantung dan merekalah, apa kelahiran kemerdekaan itu akan bersamaan dengan darah dan air mata, atau proses itu berlangsung secara damai.’ Bahwa kekuasaan Belanda akan berakhir, bagi saya hal itu sudah pasti. Soalnya bukan ya atau tidak, tapi cepat atau lambat. Janganlah Nederland memukau diri, bahwa kekuasaan kolonialnya akan kokoh kuat sampai akhir zaman!

Masih ada satu soal yang ingin saya singgung, Tuan Ketua, yakni penahanan kami secara preventif. Kami berdiri di sini tidak sebagai penjajah, tetapi kami adalah orang-orang yang jujur yang bersedia membela pendirian kami. Karena itu Tuan boleh percaya akan apa yang saya katakan di sini! Penahanan kami secara preventif selaluhendak dibenarkan karena yang berwenang takut bahwa kami akan melarikan diri. “Melarikan diri”, Tuan Ketua! Kami terlalu bangga untuk mau melarikan diri. Kami berjuang untuk suatu cita-cita yang tinggi, dan me.. larikan diri hanya akan

merugikan perjuangan kami dan cita-cita kami. Keyakinan kami mungkin tidak sama dengan cita-cita tuan, tapi satu hal kiranya boleh kita miliki bersama karena kami bukan penjahat, yakni menghormati keyakinan masing-masing. Hormat dan tuan itupun akan menyadarkan tuan, bahwa melarikan diri adalah langkah yang terakhir yang akan kami pikirkan.

Namun baiklah, saya tidak akan bicara secara abstrak saja. Man saya keluarkan bukti-bukti konkret untuk meyakinkan tuan bahwa motif tuan tentang “takut yang bersangkutan akan melarikan diri”, sama sekali tak ada dasarnya. Jika saya pernah berpikir untuk melarikan diri, maka pengadilan Belanda tidak akan dapat menangkap saya. Saya dengan aman berada di negeri Swis, ketika kalangan kami digerebeg dan kami mulai dituntut. Dan saya akan tetap tinggal di sana (Swis), jika terdapat sedikit saja rasa kecemasan pada diri saya bahwa saya akan dituntut secara pidana. Nah, sebaliknya yang telah saya lakukan! Justru mengingat bahwa perkara kami akan disidangkan secara terbuka, kira-kira menurut dugaan saya, pada akhir September 1927, maka saya memperpendek liburan saya di luar negeri, dan saya segera kembali ke Nederland. Demikian pula ketiga orang teman saya sebangsa yang berada di luar negeri selama bulan-bulan liburan itu. (Catatan: saat Bung Hatta diadili, beliau masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Rotterdam, Belanda).

Andaikata terpikir oleh mereka untuk melarikan diri, maka mudah saja bagi mereka untuk memilih menetap di luar negeri itu! Namun, tuan Ketua, kami adalah ksatria dan karena itu kami tidak mau melakukan tindakan-tindakan pengecut. Kesatria kami rupanya diganjar dengan memenjarakan kami selama lima setengah bulan. Motif “takut yang bersangkutan melarikan diri” tak dapat Tuan bela. Oleh sebab itu saya sekarang mendesak sekeras-kerasnya, agar sambil menanti vonis Tuan mengenai aksi kami, penahanan secara preventif ini dihentikan segera. Saya percaya bahwa dalam hal ini Tuan juga akan mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Karena saya tidak jadi membacakan pidato pembelaan yang panjang, maka saya minta ijin, tuan Ketua, untuk membacakan bagian penutup saja dan pembelaan saya.

Tuan Hakim Ketua dan tuan-tuan hakim yang mulia! Sampailah saya sekarang pada akhir pembelaan saya, dan saya akan mempergunakan posisi saya sebagai tertuduh untuk mengadukan ketidakadilan yang selalu diperlakukan terhadap bangsa saya. Kepada Tuan, abdi Hukum dan Pengadilan, saya ajukan pertanyaan: apakah memang cocok dengan panggilan Tuan untuk membenarkan tindakan pemerintah Belanda yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukannya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang tak berdaya, anggota Perhimpunan Indonesia? Sejak beberapa lama kami di negeri ini dituntut dan dikejar-kejar dengan berbagai cara. Kami mengira, bahwa di sini, di negeri Grotius ini, yang begitu menyanjung hak-hak dasar dan warga-warga merdeka, kami juga dapat menikmati hak-hak yang sama! Rupanya ternyata tidak demikian! Oleh karena di negeri ini, penguasa tidak dapat berbuat apa-apa selain membawa kasus ke pengadilan, namun diambilnya juga tindakan yang tak mengenal moral untuk dapat menghantam kami. Dengan ancaman akan memberhentikan mereka dan dinas Pemerintah atau dengan lain-lain tindakan kesewenang-wenangan, maka orangtua kami di Indonesia dilarang mengirim uang kepada putera-putera mereka yang belajar di Eropa, selama putera-putera tersebut masih menjadi anggota Perhimpunan Indonesia.

Cara ancaman begini adalah ibarat sebilah pisau dengan dua mata. Di satu pihak para putera yang berada dalam masyarakat asing diserahkan bulat-bulat kepada keadaan yang menyedihkan, di lain pihak timbul konflik-konflik antara ayah dan anak, antara angkatan tua dan generasi muda, yang benar-benar diprovokasi. “Juga tanpa ancaman itu sudah terdapat ketegangan antara generasi tua dan generasi muda. Juga, tanpa intervensi itu, maka bapak dan putera hidup dalam suasana yang terpisah. Angkatan tua yang berkarat dalam tradisi dan merasa bahwa akhir hidupnya telah mendekat, condong untuk mempertahankan apa yang ada dan berharap-harap dengan pihak muda yang mengazankan merahnya fajar, yang jiwanya diberi semangat oleh keadaan yang baru.

Pada hati kaum muda itu terdapat keyakinan yang terlampau kuat, kepercayaan yang terlalu hidup Sehingga tidak dapat dicekik. Cita-cita dan kedambaan mereka

terlalu mendalam, sehingga kaum muda, walaupun dengan hati sedih, bersedia untuk memutuskan ikatan darah dan keluarga, agar dapat menyelamatkan keyakinan mereka.” Meskipun begitu, Tuan Ketua, cara provokasi ini, yang maksudnya adalah agar beberapa di antara mahasiswa Indonesia di sini terhukum oleh kesengsaraan dan serba kekurangan, adalah tidak adil, bertentangan dengan hukum dan jahat!

Kepada Tuan-tuan, wakil-wakil dan hukum yang mulia, saya bertanya dengan penuh kepercayaan, apakah ini bukan metode tak langsung untuk melucuti dan kami yang belajar di sini suatu kemerdekaan untuk bergerak, yang bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Nederland? Kepada Tuan, berani saya mengajukan pertanyaan dengan penuh kepercayaan, apakah ini bukan suatu pelanggaran daripada kemerdekaan-kemerdekaan yang dijamin oleh “Grondwet” (konstitusi Belanda)?

Tidakkah akan lebih banyak timbul kepahitan kepada kami, jika kami dengan cara yang sembrono dan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, disuruh merasakan kepahitan hidup sebagai anggota bangsa yang dijajah? Terlalu jelas diperlihatkan kepada kami bahwa buat kami, putera bangsa kulit berwarna, tidaklah berlaku kepastian hukum. Namun orang-orang Indonesia dan Perhimpunan Indonesia tahu menderita, seperti halnya setiap angkatan muda dan bangsa yang tertindas. Dalam masa remaja mereka sudah harus menderita serba kekurangan dan mereka harus memberi pengorbanan.

Tetapi semua itu hanyalah mempertebal semangat mereka dan memperkokoh karakter mereka untuk terus berjuang demi cita-cita yang menghimbau dan memanggil. Suara misteri dan himbauan massa Indonesia telah mengetuk hati mereka dan bersama-sama dengan massa itulah mereka berjuang. Kami percaya pada masa depan bangsa kami dan kami percaya pada tenaga-tenaga tersembunyi mereka. Kami mengetahui bahwa perimbangan kekuatan di Indonesia terus berkisar ke arah yang menguntungkan kami. “Orang mengatakan”, demikian Indonesia Merdeka, “bahwa bangsa kita yang besar di masa lampau, tidak akan dapat berbuat yang agung dewasa ini; bahwa tak dapatlah menghentikan garis menurunnya.”

Kami tidak akan memberikan vonis kepada bangsa kami; biarlah sejarah yang menilainya. Bersama rakyat, kami akan dihukum, atau kami akan dibebaskan. Karena bersama dengan rakyat itu kami akan mendapat kehormatan, dan bersama rakyat itu kami akan tenggelam. Pemuda Indonesia merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan daripada bangsa Indonesia, yang menderita dan yang berharap. Pemuda Indonesia adalah hati nurani bangsa yang berbicara, jiwa bangsa yang menyala, yang akan mewarnai masa depan. Cahaya merona masa depan mulai bersinar dewasa ini.

Kami menyambutnya sebagai fajar yang muncul. Pemuda Indonesia harus ikut mengemudi menuju arah yang tepat. Tugasnya adalah mempercepat datangnya hari yang baru. Ia harus mengajarkan kepada rakyat untuk menikmati keindahan hidup; jangan hanya kesengsaraan saja yang harus menjadi nasib rakyat. Semoga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan di bawah langit yang biru dan merasa dirinya sebagai yang mempunyai negeri, karuniarakhmat Tuhan.

Tuan yang terhormat! Sementara saya sekarang siap untuk mendengarkan keputusan Tuan tentang gerakan kami, teringatlah saya akan kata-kata pujangga Rene de Clercq, yang oleh Indonesia Muda dijadikan pedomannya:

“Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dan perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku.”

Den Haag, 9 Maret 1928

BAB IV

KONTEKSTUALISASI ERA REFORMASI



A. Memaknai Kembali Kesadaran Etika Politik.

1. Definisi Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.

- a. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).
- b. Biasanya bila kita mengalami kesulitan untuk memahami arti sebuah kata maka kita akan mencari arti kata tersebut dalam kamus. Tetapi ternyata tidak semua kamus mencantumkan arti dari sebuah kata secara lengkap. Hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan yang dilakukan oleh K. Bertens terhadap arti kata ‘etika’ yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama dengan Kamus Bahasa Indonesia yang baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953 – mengutip dari Bertens,2000), etika mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Sedangkan kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dari perbandingan kedua kamus tersebut terlihat bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama hanya terdapat satu arti saja yaitu etika sebagai ilmu. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia yang baru memuat beberapa arti. Kalau kita misalnya sedang membaca sebuah kalimat di berita surat kabar “Dalam dunia bisnis etika merosot terus” maka kata ‘etika’ di sini bila dikaitkan dengan arti yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama tersebut tidak cocok karena maksud dari kata ‘etika’ dalam kalimat tersebut bukan etika sebagai ilmu melainkan ‘nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat’. Jadi arti kata ‘etika’ dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama tidak lengkap.

K. Bertens berpendapat bahwa arti kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat lebih dipertajam dan susunan atau urutannya lebih baik dibalik, karena arti kata ke-3 lebih mendasar daripada arti kata ke-1. Sehingga arti dan susunannya menjadi seperti berikut :

1. nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang Jawa, etika agama Budha, etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan etika di sini bukan etika sebagai ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisaberfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.

2. kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik.
Contoh : Kode Etik Jurnalistik

3. ilmu tentang yang baik atau buruk.

Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.

Etika adalah bidang kajian filsafat yang terkait dengan persoalan nilai moral perilaku manusia. Dalam sistematika filsafat, ia merupakan bagian dari kajian aksiologi, yaitu cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai. Sebagai bagian dari kajian filsafat, etika merupakan pemikiran filosofis tentang nilai moral, bukan nilai moral itu sendiri. Nilai moral adalah kualitas perilaku baik dari manusia. Ajaran yang memberi manusia tentang bagaimana berperilaku dengan kualitas baik adalah moralitas atau dalam Islam dikenal dengan akhlak. Maka etika adalah ilmu atau lebih tepatnya pengetahuan filosofis, dan bukan merupakan ajaran (normatif) sebagaimana moralitas atau akhlak. Setiap moralitas atau akhlak menghendaki supaya manusia berperilaku baik sesuai dengan yang diajarkan, sedang etika menghendaki supaya manusia melakukan tindakan baik itu dengan kesadaran dan kepahamannya. Sadar dan paham atas apa yang dilakukannya, atas sumber dari mana “petunjuk” perbuatan itu, atas alasan kenapa perbuatan itu dilakukannya, dan atas apa konsekuensi perbuatan itu jika benar-benar dilakukannya.

Terkait dengan ini, maka dapat kita temukan dua macam kajian etika.

Pertama, adalah etika deskriptif yaitu etika yang terlibat analisis kritis tentang sikap dan perilaku manusia dan (nilai) apa yang ingin dicapai dalam hidup ini. Dengan tanpa terlibat upaya memberikan “penilaian”, etika ini membicarakan tentang perilaku apa adanya, yaitu perilaku yang terjadi pada situasi dan realitas konkrit yang membudaya. Apa ukuran baik dan buruk bagi suatu tindakan, benarkah nilai-nilai itu bersifat absolut ataukah relatif, berlaku universal ataukah lokal, apa sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran nilai-nilai etika itu.

Kedua adalah etika normatif. Dengan kajian yang mendalam, etika ini berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki dan

dijalankan manusia serta tindakan apa yang seharusnya diambil untuk menggapai sesuatu yang bernilai dalam hidup ini.

Dari dua macam etika ini, terlihat bahwa dalam kajiannya, etika selalu terlibat analisis untuk “mengurai” tindakan yang oleh akhlak disebut “baik” itu, bahkan “mengurai” apa sebenarnya yang disebut akhlak itu. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah akhlak terkadang disebut dengan istilah *adab*. Maka, orang yang berakhlak, lalu disebut orang yang beradab, sebaliknya orang yang buruk perilakunya, disebut tidak beradab. Istilah akhlak terkadang juga disebut dengan sopan santun. Jika ada sekelompok masyarakat yang dapat hidup rukun, giat bekerja dengan cara-cara yang baik, masyarakat yang demikian ini lalu disebut dengan masyarakat yang *santun* atau yang mempunyai sopan santun, maka ada istilah masyarakat yang santun atau masyarakat yang beradab (*civil society*).

Dalam etika, nilai perilaku manusia dapat dibedakan dari dua sudut pandang. *Pertama*, perilaku yang dilihat dari sudut tujuannya. Pembahasan mengenai perilaku demikian, dalam kajian etika dikenal dengan *teleologis*. Berasal dari kata *telos* yang berarti tujuan. Teleologis adalah paham etika yang menekankan moral pada nilai intrinsik sebagai konsekuensi suatu perbuatan. *Kedua*, perilaku yang dilihat dari sudut prosesnya, yang dalam kajian etika dikenal *deontologis*. Berasal dari kata *deon* yang berarti proses. Deontologi adalah suatu paham etika yang menekankan perbuatan moral bukan pada nilai intrinsik dari konsekuensi perbuatan baik dan bijak karena perbuatan itu sendiri.

Secara sederhana bisa dikatakan, dua hal inilah yang menjadi ukuran baik-tidaknya akhlak seseorang. Pada yang pertama, perilaku manusia dikatakan baik jika tujuannya baik atau sebaliknya, perilaku manusia dapat dikatakan buruk jika tujuannya buruk. Sementara pada yang kedua, meski tujuannya buruk jika proses perilaku itu baik, maka perilaku itu tetap dikatakan baik, sebaliknya jika memang prosesnya buruk, meski tujuannya baik, perilaku akan tetap dikatakan buruk. Kekacauan dalam melihat dua hal –tujuan dan proses– ini, mengakibatkan apa yang

dimaksud dengan akhlak itu menjadi kabur. Misalnya: seseorang yang ingin menyantuni anak yatim, membantu fakir-miskin, atau memberi nafkah keluarga, memberi sumbangan pada masjid atau madrasah; semua ini jelas merupakan tujuan yang baik. Tetapi jika tujuan baik ini diwujudkan dengan cara-cara yang salah, seperti: memasang lotre, mencuri, korupsi, menipu, dan lain sebagainya, tentu semua ini tidak bisa disebut perbuatan yang baik atau berakhlak.

Istilah etika sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bahasa ini sudah menjadi bahasa umum untuk menyebut bahasa lain dari perbuatan, perilaku dan tindakan. Pada dasarnya etika merupakan suatu ilmu yang khusus mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia. Pada sisi lain etika juga dimaknai sebagai sistem nilai dan kumpulan asas (kode etik). Dalam pembahasan etika, persoalan yang diperbincangkan mengenai konteks baik atau buruk suatu perbuatan manusia. Khususnya mengenai nilai-nilai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu. Pengelompokan perbuatan baik dan buruk tentunya mengacu pada aturan yang berlaku sebagai landasan etika.

Setiap manusia memiliki hati nurani yang menjadi penyaring sebelum melakukan tindakan. Naluri inilah yang menjadi pengontrol untuk melakukan perbuatan yang baik. Tindakan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yakni baik atau buruk. Dalam pengelompokan tersebut memberikan batasan bagi setiap manusia agar tidak melakukan apa yang ingin dilakukan melainkan tindakan itu harus disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun dalam kenyataan dilapangan, khususnya ranah politik, terkadang perbuatan yang baik berdampak buruk dan perbuatan yang buruk berdampak baik. Hal ini terjadi karena pemahaman ‘menghalalkan segala cara’ menghiiasi pentas perpolitikan di Indonesia.

Dinamika politik kebangsaan baik politik lokal maupun politik nasional hampir melupakan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara hukum, negara religius, dan negara yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya. Keterkaitan etika dan politik sangat erat karena politik tanpa etika tentunya akan melahirkan dampak negative yang tersistematis. Perlu kita cermati fakta yang terjadi di lapangan bahwa beberapa kasus politik disebabkan oleh hilangnya ruh etika pada diri seorang politisi. Keterpurukan etika inilah menyebabkan maraknya kecurangan seperti politik uang, kampanye negative, pembohongan masyarakat, janji kepalsuandan perang kata-kata. Keterpurukan tersebut terkadang dimaknai sebagai bagian dari strategi politik untuk mencapai target. Sehingga segala cara dilakukan tanpa mengindahkan nilai hakiki yang telah dianut masyarakat Indonesia sejak pra kemerdekaan. Perlu dipahami bahwa hal ini sangat menciderai hati nurani dan prinsip demokrasi masyarakat Indonesia yang khas dengan kearifan lokal sebagai bangsa yang bermartabat.

Merosotnya etika para aktor politik membuat masyarakat Indonesia gelisah dalam menggapai kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik. Pelaku politik cenderung hanya berbicara kepentingan praktis. Padahal dalam setiap ruang dan waktu terdapat batasan perilaku manusia yang dirumuskan dalam sebuah tata nilai berkehidupan. Penanaman etikalah yang perlu diindahkan oleh semua pelaku politik tanpa terkecuali. Biar bagaimanapun juga, praktek politik tidak akan pernah mencapai posisi ideal jika melupakan prinsip-prinsip etika. Etikalah yang akan mengarahkan kearah yang lebih baik karena etika akan berperan sebagai pengendali setiap gerak langkah.

Sebenarnya etika dalam politik tidak susah untuk diaplikasikan. Penulis pun meyakini bahwa sebenarnya para pelaku politik sadar bahwa praktek kecurangan yang dilakukan itu tidak dibenarkan. Hanya saja karena hal ideal ini diperhadapkan dengan kesenangan pragmatis yang justru menghancurkan rumusan nilai yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu.

Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfer politik. Penafsiran politik itu baik atau buruk sangat tergantung pada aktor (pelaku) politik itu sendiri. Akan mengarah ke hal yang positif jika pelakunya memiliki kesadaran akan sebuah prinsip moral dan mengarah ke hal negative jika mengabaikan prinsip tersebut. Pada dasarnya politisilah yang memiliki peran penting dalam mengendalikan praktek politik itu sendiri.

Penilaian bahwa politik itu suatu perjuangan, politik itu suatu ibadah, politik itu suatu kebajikan yang perlu dicapai bersama-sama. Hal ini hanyalah sekedar hayalan apabila elemen masyarakat menjadi penonton sejati atas rekayasa yang dilakukan oleh politisi. Dengan demikian, perlu ada kontrol sosial agar keterpurukan tidak semakin merajalela.

B. Refleksi Perilaku Politik Bung Hatta.

Ketika para pemimpin lain jatuh bangun, Bung Hatta menunjukkan integritasnya sebagai sosok tidak (ter)korupsi(kan), meski kesempatan baginya terbuka lebar dan dapat diciptakan. Sejarah mencatat bahwa pria berkacamata kelahiran 12 Agustus 1902 ini adalah seorang yang memasuki ranah politik dalam kesederhanaan, dan tetap sederhana saat meninggalkannya. Jika boleh disederhanakan lagi, dalam diri Bung Hatta terkumpul sifat kejujuran, kesederhanaan, keteguhan hati, serta kekuatan karakter yang sulit dicarikan tandingan.

Keteladanan ini secara mudah bisa dilihat dari keteguhan Bung Hatta untuk selalu mengedepankan kepentingan negara, bahkan mengabaikan keluarganya sendirinya. Pada 1950-an misalnya istrinya, Rahmi Hatta, berkeinginan membeli mesin jahit dengan caramenyisihkan uang belanja. Ketika tabungannya hampir mencapai harga mesin jahit, tiba-tiba terjadi sanering (pemotongan nilai uang) dari

Rp100 menjadi Rp1. Nilai tabungan istrinya otomatis juga turun dan tidak bisa menjangkau harga mesin jahit.

Ketika Bung Hatta pulang, Rahmi mengeluh karena suaminya itu tidak pernah memberi tahu jika akan ada sanering. Padahal sebagai wakil presiden, dia pasti tahu rencana kebijakan tersebut. Kalau saja diberi tahu lebih awal, mungkin Rahmi bisa melakukan sesuatu dengan tabungannya. Namun, jawaban Bung Hatta sungguh bernas, “Saya percaya kepadamu. Tetapi, rahasia negara tetap rahasia, tidak boleh bocor kepada siapa pun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan negara.”

Asketisme politik Bung Hatta ini tentu sangat relevan untuk diaktualisasikan oleh para politisi kontemporer, yang dalam faktanya hampir-hampir nihil keteladanan. Yang mencuat dari belantara perpolitikan nasional mutakhir justru fenomena kesenjangan logika antara rakyat dengan elitnya. Berbagai problem sosial yang dihadapi rakyat seperti tidak terdeteksi oleh kalangan “the have” ini sehingga ragam perilaku dan kebijakan yang antirakyat begitu mudah bergulir. Fakta kehidupan politik yang kental dengan nuansa keglamoran dan sikap hedonisme, dengan ketidaksungkapan tampilparlentedan “serbaluks” layaknya kaum selebritas.

Mereka seolah hanya memikirkan kenyamanan dan kenikmatan hidup sendiri dan keluarganya saja, tanpa memikirkan hidupan orang lain, apalagi rakyatnya. Sementara di ujung lain, jutaan rakyat terhimpit dalam kemiskinan, masuk deretan angka putus sekolah yang fantastik, jeritan buruh menuntut kesejahteraan, dan ragam problem lainnya. Singkatnya, para politikus sudah melupakan “wasiat” Bung Hatta bahwa demokrasi membutuhkan sikap tanggung jawab dan toleransi.

Model demokrasi yang mengedepankan unjuk kekuatan massa pendukung otot maupun uang, justru mendominasi perilaku politik di republik ini. Bagaimana masih bisa dikatakan bermoral jika mereka melakukan jual beli pasal dalam menyusun undang-undang (UU)? Para politisi sebagai pemegang kartu permainan seperti rombongan aji mumpung yang menjadikan politik sebagai industri cari makan dan kekuasaan.

C. Menjadikan Etika Politik Dalam Rangka Hidup Bersama:

1. Norma Ideal Berperilaku Politik.

Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dan sarat akan sebuah nilai moral. Pancasila sebagai falsafah negara perlu dijunjung tinggi. Pancasila ditempatkan pada posisi yang strategis menjadi pedoman tata nilai bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, nilai-nilai ideal yang terformat dalam sebuah norma perlu diterapkan bersama. Norma agama sebagai salah satu norma yang sangat strategis untuk dijadikan landasan berperilaku. Dalam norma agama terdapat berbagai macam pesan kehidupan Ilahiah terkait dengan perilaku manusia sehingga dapat mengajarkan para politisi akan makna kehidupan bermasyarakat. Semua agama tentunya menjunjung tinggi kesejahteraan, anti pembodohan, melawan kezhaliman dan kecurangan. Selain itu, guna menopang penyempurnaan landasan etika dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang publik, maka dikombinasikan dengan norma lain yang mengikat.

Norma lain yang cukup ideal menjadi pedoman etika yaitu norma hukum dan norma adat. Di dalam hukum terdapat pula berbagai macam aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum yang tidak tertulis meliputi asz-asaz umum pemerintahan yang baik yaitu asaz bertindak cermat, asaz kewajaran dan asaz keadilan. Hukum bukan untuk dilanggar tetapi mesti ditaati oleh semua elemen (pemerintah, swasta dan masyarakat). Hadirnya hukum menjadi salah satu landasan etika, menjadi suatu catatan berharga bagi para politisi agar memahami substansi dari hukum itu sendiri.

Bukan hanya itu, norma adat juga perlu untuk kembali dijunjung tinggi agar nuansa kearifan lokal tetap terjaga dalam perpolitikan. Ada beberapa nilai yang sudah terlupakan di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan. Nilai tersebut yakni *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbi*, *sipatokkong* dan *siparabbe*. Jadi, norma tersebut perlu untuk ditaati bersama, terutama para politisi. Norma-norma tersebut merupakan norma yang ideal dalam berperilaku. Norma inilah yang dapat memperbaiki kembali

keburukan yang terjadi di pentas perpolitikan. Nilai dalam norma tersebut sangat diharapkan ditanamkan dalam sanubari pelaku politik.

2. Tanggungjawab Sosial.

Para politisi perlu diingatkan bahwa peran mereka tersisipi suatu tanggungjawab sosial. Bukan sekedar tanggungjawab pribadi, partai atau golongan. Ketika aktivitas yang dilakukan itu penuh dengan tanggungjawab sosial maka tentunya adasuatu pertanggungjawaban moral kepada masyarakat atas semua hal yang dilakukan. Tanggungjawab sosial mestinya dimaknai sebagai janji. Artinya, berbicara janji, tentunya berbicara sesuatu yang harus ditepati sehingga apabila tidak ditepati maka dengan sendirinya mendapat sanksi. Minimal dalam bentuk sanksi moral.

Dalam pemaknaan ini, ketika para politisi sadar akan tanggungjawab sosial maka dengan sendirinya mereka selalu memperhatikan etika dalam berpolitik. Enggan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari esensi yang sebenarnya dari politik.

Hal yang pertama dan utama dibutuhkan pada konteks ini adalah kesadaran etika politik. Apabila kesadaran itu dimiliki maka politisi pasti akan selalu berperilaku yang baik. Tentunya akan menghasilkan tanggungjawab sosial yang bertabat. Perlahan tapi pasti **menghantarkan** pada pintu gerbang kebangkitan Indonesia ke arah yang lebih baik.

3. Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

Pancasila sebagai sumber etika politik membangkitkan kesadaran bahwa rakyat Indonesia harus bisa hidup bersama (*Living Together*), berdampingan, penuh kedamaian (*Darul Salam*), berprinsip *Ukhuwah Wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* menjadikan semangat nasionalisme demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera,

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan:

1. Asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Legitimasi demokrasi; disahkan dan dijalankan secara demokratis.
3. Legitimasi moral; dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral.

Hal ini ditegaskan oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus ke dalam negara kekuasaan (*machtstaats*).

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila V, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan bernegara. Salah satu unsure negara adalah rakyat maka segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung utama negara. Dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislative serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan perkataan lain harus memiliki legitimasi demokratis.

Prinsip-prinsip dasar etika politik tersebut di atas dalam realisasi praksis kehidupan kenegaraan senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiganya. Kebijakan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi nasional maupun internasional, yang terkait dengan rakyat, selain berdasarkan hukum yang berlaku harus mendapat legitimasi demokratis dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Misalnya: kebijakan harga BBM, Tarif Dasar Listrik, Tarif Telefon, kebijakan ekonomi mikro ataupun makro, dan reformasi infra struktur politik harus didasarkan atas tiga prinsip tersebut.

Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para anggota DPR maupun MPR, aparat penegak hukum, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar legitimasi moral. Misalnya suatu kebijaksanaan itu sudah sesuai dengan hukum tapi belum tentu sesuai dengan moral. Misalnya gaji para pejabat dan anggota

DPR/MPR itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang menderita maka belum tentu layak secara moral.

4. Pancasila sebagai Paradigma Rumah Keberagamaan dalam Bernegara.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, paradigma berarti kerangka berpikir. Pada tahun 1975, George Ritzer memberikan pengertian yang lebih jelas dibanding dengan pengertian paradigm sebelumnya. Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian paradigma merupakan alat bantu bagi ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan ilmu yang diperoleh.¹

Paradigma adalah suatu jendela tempat seseorang akan menyaksikan fenomena, memahami, dan menafsirkan secara objektif berdasarkan kerangka acuan yang terkandung di dalam paradigma tersebut, baik itu konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan kategori-kategori tertentu. Oleh karena itu, terhadap suatu fenomena yang sama yang dilihat dan paradigma yang berbeda akan menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda.

Pancasila sebagai paradigma rumah keberagamaan dalam bernegara berarti Pancasila merupakan dasar/kerangka berpikir/fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia memandang dunia dalam kerangka Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Misalnya dalam melaksanakan pembangunan nasional, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai barometer keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Apakah pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau malah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdasarkan Pancasila. Segala ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak semua ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang di Indonesia.

Realitas sejarah membuktikan bahwa sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologi antara blok Barat yang mengusung liberalisme-kapitalisme dan Blok Timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, terjadi perubahan

¹Margono. *Ibid. Op.Cit.* Hlm. 82

mendasar pada tata pengaulan dunia. Beberapa kalangan mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin di akhir dekade 1980-an dunia ini mengakhiri periode bipolar dan memasuki periode multipolar. Periode multipolar yang dimulai awal 1990-an yang kita ;il;imi sela1Tu sekitan saw dekade, juga pada akhirnya disinyalir banyak pihak terutama pana pengamat politik internasional, telah berakhir setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George Bush menyuguhkan doktrin unilateralisme dalam menangani masalah internasional sebagai wujud dan konsepsi dunia unipolar yang ada di hawah pengaruhnya.

Berakhirnya perang ideologis tidak berarti hilangnya konsep “saling mempengaruhi” antarnegara. Kemungkinan untuk saling berebut pengaruh dapat kembali muncul, sebagaimana fenomena persaingan antarbangsa dan negara pada dimensi ekonomi karena setiap negara berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negaranya (AFTA 2010, MEA 2015). Kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lainnya. Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki karakter utama. Ia adalah paradigma dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai paradigma rumah kehidupan keberagaman dalam bernegara, Pancasila menjadi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara wanga negara dan tanah airnya. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Dengan ditubuhnya genderang reformasi, ini merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan citacita para pendiri negara untuk membangun negara Republik Indonesia yang berkarakter dan bermartabat.

Meskipun sekarang terlihat melemahnya kesadaran hidup berbangsa terutama dalam bidang politik. Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang mempromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila. Dengan demikian, diperlukan

suatu kebulatan tekad untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar kesejahteraan nasional dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Jika mencermati bangsa Indonesia secara sosiologis dan antropologis, maka akan menemukan bahwa keragaman suku, bahasa bahkan agama merupakan pemandangan rutin yang tak mungkin ditepis. Heterogenitas latar belakang tersebut, mungkin saja dapat membuka peluang bagi terjadinya beragam konflik horizontal. Ironisnya, kekhawatiran itu tidak terjadi. Selain terkenal cinta damai, masyarakat Indonesia menyimpan warisan leluhur yang menjadi alat perekat sekaligus benteng terjadinya konflik. Alat perekat itu tidak hanya digali dari kultur Indonesia yang memang cukup kaya, tapi juga diderivasi dari moralitas agama yang melahirkan sistem keyakinan. Lihat saja misalnya Pancasila, selain dijadikan sebagai falsafah bangsa Indonesia dan sekaligus dasar negara serta sebagai sumber etika politik, rumusan-rumusannya juga digali dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia, yang sudah tentu sejalan dengan moralitas agama. Beragam suku, bahasa, agama dapat menerima Pancasila sebagai konsensus sosial yang menaungi berbagai heterogenitas.

Jadi, masyarakat yang dikehendaki Pancasila memiliki karakteristik; religius, beradab (*civilized*), beretika, bersatu, bermusyawarah, dan mengutamakan keadilan bagi setiap pihak. Karakteristik yang dibangun Pancasila menjadi kepribadian dasar bagi seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu menembus keragaman suku bangsa atau keyakinan sekalipun.

BAB V

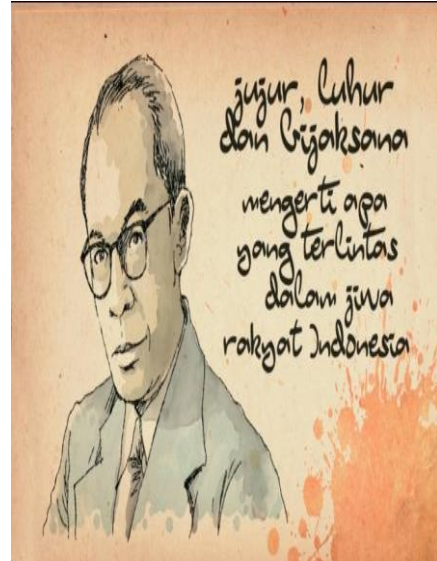
Kesimpulan

Teladan Bung Hatta

Kesederhanaannya

- Meski berstatus wakil presiden dan kemudian mantan wakil presiden namun Hatta selalu **hidup dalam kesederhanaan**. Hatta punya impian memiliki sepatu Bally namun tak pernah punya cukup uang untuk membelinya. Beliau menggantung sebuah iklan sepatu Bally dan menyimpannya di buku harian. Keluarga baru menyadarinya ketika beliau sudah berpulang.
- Ketika meninggal, Hatta hanya mewariskan 60.000 judul buku kepada anak-anaknya. Tak ada emas batangan, tak ada deposito dan tabungan di rekening luar negeri, tak ada berhektar-hektar tanah dan ratusan properti. Gemala Hatta bercerita bahkan suatu hari Hatta merasa perlu menemui gubernur DKI (waktu itu) Ali Sadikin untuk meminta keringanan pembayaran rekening listrik yang tak sanggup dia bayar.
- Beliau hemat dan suka menabung

<http://daenggassing.com/2011/02/04/teladan-dari-si-bung/>



Berdasarkan pada tahap-tahap pembahasan mengenai **PERILAKU POLITIK BUNG HATTA (Sebuah Telaah Etika Politik)** dapat disimpulkan bahwa Bung Hatta telah meninggalkan teladan asketisme politik yang berlandaskan pada prinsip kejujuran, kesederhanaan, luhur dan bijaksana, dibarengi dengan tindakan yang memihak kemaslahatan rakyat. *Etika Politik* menginginkan tampilnya perilaku politik pada aras nilai moral atau etika sosial untuk mewujudkan makna general di dalam rumah kehidupan guna merajut kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara.

Kendatipun begitu, Pancasila sebagai sumber etika politik membangkitkan kesadaran bahwa rakyat Indonesia harus bisa hidup bersama (*Living Together*), berdampingan, penuh kedamaian (*Darul Salam*), berprinsip *Ukhuwah Wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* menjadikan semangat nasionalisme demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera,

Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadiran Allah Swt. laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga bermanfaat, *Amin*.

Daftar Pustaka:

A. Buku-buku:

- Abdullah, Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Aswab, Mahasin dan Ismed Natsir, *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Audah, Ali, *Memoir: Mohammad Hatta*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1979.
- Azhar, Muhammad, *Etika Politik Islam: Studi Kritis Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: New Transmedia, 2014.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charis Zuber, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bertens, K., *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, 1994.
- Edwards, Paul (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy*, reprinted edition Vol.3, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Pres, 1972.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Hamidi, Jazim dan Luthfi Mustafa, *Civic Education*, Gramedia, Jakarta 2010.
- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Hatta, Mohammad, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta, Tintamas, 1980.
- _____, *Karya Lengkap Bung Hatta: Kebangsaan & Kerakyatan*, Jakarta: LP3S, 1998.
- _____, *Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi: Untuk Negeriku 1*, Jakarta: Kompas, 2010.
- _____, *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan & Demokrasi*, Jakarta: LP3S, 1998.
- _____, *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia & Keadilan Sosial*, Jakarta: LP3S, 1998.
- _____, *Berjuang dan Dibuang: Untuk Negeriku 2*, Jakarta: Kompas, 2011
- _____, *Menuju Gerbang Kemerdekaan: Untuk Negeriku 3*, Jakarta: Kompas, 2011
- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Kailan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

- Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Mahasin, Aswab & Ismed Natsir, *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta:LP3ES, 1984.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 1999.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Runes, Dagobert D., *Dictionary of Philosophy*, New Jersey: Littlefield, Adams & Co., 1971.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tono, Suwidi, *Mahakarya Soekarno-Hatta*, Jakarta: PT Perspektif Media Komunika, 2008.

B. Berbagai sumber (akses) internet.